Kementerian
Lingkungan Hidup
dan Kehutanan

RENCANA KERJA 2024

Direktorat Jenderal Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan

Balai Pengamanan dan Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan Wilayah Maluku dan Papua

FIGHT AGAINST X-CRIME

GAKKUM

TIM PENYUSUN

Pengarah:

Leonardo Gultom, S.Sos., M.Si.

Penanggungjawab:

Imam Febriansyah, S.Hut.

Koordinator:

Achmad Afandy, S.Hut.

Anggota:

M. Shidiq Alathif, S.H.

Diah Eva Angelina, S.E.

Rezza Rahmawan, S.E.

Kaleb Felix A.H.M. Sihombing, A.Md. Kom.

KEPUTUSAN KEPALA BALAI PENGAMANAN DAN PENEGAKAN HUKUM LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN WILAYAH MALUKU DAN PAPUA
Nomor : SK.46/BPPHLHK.5/TU/REN.4.6/B/12/2023

TENTANG
RENCANA KERJA
BALAI PENGAMANAN DAN PENEGAKAN HUKUM
LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN WILAYAH MALUKU DAN PAPUA TAHUN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA;
KEPALA BALAI PENGAMANAN DAN PENEGAKAN HUKUM LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN WILAYAH MALUKU DAN PAPUA,

Menimbang :

a. bahwa berdasarkan Pasal 1 ayat (2) Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.51/MENLHK/SETJEN/KUM. 1/10/2017 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Eselon I selaku penanggung jawab Program dan Eselon II serta Unit Pelaksana Teknis (UPT) selaku penanggung jawab kegiatan untuk menyusun Rencana Kerja yang berpedoman pada Rencana Kerja Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
b. bahwa berdasarkan Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK.1173/MENLHK/SETJEN/REN.0/11/2022 tentang Rencana Kerja Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2023, diamanatka Rencana Kerja di setiap tahun untuk Eselon I, unit kerja Eselon II dan Unit Pelaksana Teknis di lingkup Direktorat Jenderal Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Balai Pengamanan dan Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan Wilayah Maluku Papua tentang Rencana Kerja Balai Pengamanan dan Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan Wilayah Maluku Papua Tahun 2023;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Ratifikasi terhadap Konvensi PBB tentang Pengesahan Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Wanita (Convention on the Elimination of all Fonn Dicrimination.Against Women/ CEDAW) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 29 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor3277);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3419);

3. Undang-Undang …

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lernbaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor3886);
4. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4412);
5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
7. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2007 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 s/d 2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059) sebagaimana telah di ubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
9. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5164);
10. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5432) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

11. Undang-Undang …

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

11. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2014 tentang Konservasi Tanah dan Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 299, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5808);
12. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
13. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
14. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 92 Tahun 2020 tentang Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2020 Tahun 209);
15. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2023 Tahun 111);
16. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor10)
17. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 15 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 756);
18. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.16/MENLHK/SETJEN/SET.1/8/2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 80);
19. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 13 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Pengamanan dan Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 719);
20. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK.91263/MENLHK/SETJEN/REN.0/11/2023 tentang Rencana Kerja Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2024;
21. Keputusan Direktur Jenderal Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK.53/PHLHK/SETPHLHK/REN.4.6/B/12/ 2023 tentang Rencana Kerja Direktorat Jenderal Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2024.

Memperhatikan : ...

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

Memperhatikan : 1. Peraturan Direktur Jenderal Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor: P.1 Tahun 2022 tentang Perubahan PeraturanDirektur Jenderal Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor: P.6 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Direktorat Jenderal Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2020 s.d 2024;

2. Peraturan Direktur Jenderal Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor: P. 8 Tahun 2020 tentang Indikator Kinerja Utama Direktorat Jenderal Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2020 s.d 2024;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA BALAI PENGAMANAN DAN PENEGAKAN HUKUM LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN WILAYAH MALUKU DAN PAPUA TENTANG RENCANA KERJA BALAI PENGAMANAN DAN PENEGAKAN HUKUM LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN WILAYAH MALUKU DAN PAPUA TAHUN 2024.

KESATU : Menetapkan Rencana Kerja Balai Pengamanan dan Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan Wilayah Maluku Papua Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Kepala Balai ini.

KEDUA : Rencana Kerja Balai Pengamanan dan Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan Wilayah Maluku dan Papua Tahun 2024 merupakan penyesuaian sasaran dan indikator sesuai dengan Prioritas Nasional Tahun 2024, dan menjadi tolak ukur dalam pelaksanaan kegiatan dan evaluasi di tahun 2024.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Manokwari
Pada tanggal : 21 Desember 2023
Plt. Kepala Balai,

Leonardo Gultom, S.Sos., M.Si.
NIP. 197506102000031002

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth:
1. Direktur Jenderal Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
2. Sekretaris Jenderal Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
3. Kepala Biro Perencanaan, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KEPALA BALAI PENGAMANAN DAN PENEGAKAN HUKUM LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN WILAYAH MALUKU DAN PAPUA
NOMOR: SK.46/BPPHLHK.5/TU/REN.4.6/B/12/2023

TENTANG RENCANA KERJA BALAI PENGAMANAN DAN PENEGAKAN HUKUM LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN WLAYAH MALUKU DAN PAPUA TAHUN 2024

RENCANA KERJA
BALAI PENGAMANAN DAN PENEGAKAN HUKUM LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN WILAYAH MALUKU DAN PAPUA TAHUN 2024

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI i

DAFTAR TABEL ii

DAFTAR GAMBAR iii

KATA PENGANTAR iv

BAB I. PENDAHULUAN 1

A. LATAR BELAKANG 2

B. KEDUDUKAN, TUGAS, DAN FUNGSI 3

C. STRUKTUR ORGANISASI 4

D. SUMBER DAYA MANUSIA 5

E. SARANA DAN PRASARANA 11

F. PENGARUSUTAMAAN GENDER 16

G. KEWENANGAN KONKUREN BIDANG KEHUTANAN 17

H. KEWENANGAN KONKUREN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP 18

I. REFORMASI BIROKRASI BPPHLHK WIL. MALUKU DAN PAPUA 19

BAB II. CAPAIAN KINERJA TAHUN 2023 22

A. CAPAIAN INDIKATOR KINERJA DAN PROGNOSIS TAHUN 2024 23

B. CAPAIAN SERAPAN ANGGARAN 2023 DAN PROGNOSIS TAHUN 2024 32

BAB III. RENCANA KERJA TAHUN 2024 34

A. STRATEGI DALAM MENDUKUNG PRIORITAS NASIONAL 35

BAB IV. PENUTUP 47

BAB V. LAMPIRAN 49

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Sebaran PNS Per Seksi Wilayah 5
Tabel 2. Sebaran PPNPN Per Seksi Wilayah 5
Tabel 3. Tabel jumlah ASN sesuai dengan Pangkat 5
Tabel 4. Tabel jumlah ASN dan PPNPN sesuai dengan Jenis Kelamin..... 6
Tabel 5. Tabel jumlah ASN dan PPNPN berdasarkan Pendidikan 7
Tabel 6. Tabel jumlah ASN dan PPNPN berdasarkan Usia 8
Tabel 7. Jumlah PPNS berdasarkan Wilayah Kerja 8
Tabel 8. Jumlah Sarana dan Prasarana 15
Tabel 9. IKK dan Target Kinerja sesuai Renstra 2020-2024 24
Tabel 10. Capaian Kinerja Utama Tahun 2020 25
Tabel 11. Capaian Kinerja Utama Tahun 2021 26
Tabel 12. Capaian Kinerja Utama Tahun 2022 27
Tabel 13. Capaian Kinerja Utama Tahun 2023 28
Tabel 14. Prognosis Capaian Kinerja Utama Tahun 2024 29
Tabel 15. Pagu Tahun 2020-2024 32
Tabel 16. Data Pagu dan Realisasi Anggaran Tahun 2020-2023 33
Tabel 17. Nilai Pagu dan Target Output Tahun 2024 46

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Struktur Organisasi BPPHLHK Wilayah Maluku dan Papua 4
Gambar 2. Gambar Jumlah SDM berdasarkan Jenis Kelamin 6
Gambar 3. Gambar Jumlah SDM berdasarkan Pendidikan 7
Gambar 4. Reformasi Birokrasi BPPHLHK Wilayah Maluku dan Papua 19
Gambar 5. Operasi Pengamanan Hutan dan Peredaran Hasil Hutan Tahun serta Polhut Yang ditingkatkan kapasitasnya Tahun 2020-2024..... 30
Gambar 6. Jumlah Usaha dan/atau kegiatan yang diawasi ketaatannya terhadap Peraturan Perundang-undangan Bidang LHK Tahun 2020-2024..... 30
Gambar 7. Jumlah kasus pidana LHK yang diselesaikan sampai dengan P21 Tahun 2020 – 2024 31
Gambar 8. Grafik Pagu Renstra dan Real Tahun 2020-2024 32
Gambar 9. Grafik Realisasi Anggaran Tahun 2020-2023 33

KATA PENGANTAR

Rencana Kerja Balai Pengamanan dan Penegakan Hukum Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Wilayah Maluku dan Papua Tahun 2024 ini disusun sebagai salah satu bentuk pedoman semua kegiatan yang dilakukan oleh Balai Pengamanan dan Penegakan Hukum Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Wilayah Maluku dan Papua dalam kurun waktu 1 (satu) tahun.

Rencana kerja ini memuat berbagai upaya dan keberhasilan Balai Pengamanan dan Penegakan Hukum Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Wilayah Maluku dan Papua dalam melaksanakan berbagai tugas yang di embankan dalam mewujudkan Pembangunan berkelanjutan berdasarkan Rencana Strategis Balai Pengamanan dan Penegakan Hukum Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Wilayah Maluku dan Papua Tahun 2020-2024, dengan hasil sesuai rencana yang di harapkan dan secara keseluruhan dapat mencapai target dan sasaran yang telah di tetapkan dengan pemanfaatan anggaran yang efektif dan efisien.

Melalui Rencana Kerja ini diharapkan adanya optimalisasi peran Balai Pengamanan dan Penegakan Hukum Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Wilayah Maluku dan Papua di dalam peningkatan efisiensi, efektifitas, dan produktivitas kinerja seluruh jajaran di lingkungan Balai Pengamanan dan Penegakan Hukum Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Wilayah Maluku dan Papua pada tahun-tahun selanjutnya.

Plt. Kepala Balai,

Leonardo Gultom, S.Sos., M.Si.
NIP. 19750610 200003 1 002

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sebagai upaya dalam melanjutkan pembangunan, Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2024 mengusung tema "Geliat Pengelolaan Hutan dan Lingkungan Hidup di Seluruh Provinsi Seiring Pertumbuhan Ekonomi yang Semakin Merata". Tema tersebut yang akan menuntun seluruh jajaran KLHK untuk terus meningkatkan setiap kinerja positif yang telah dilakukan pada tahun-tahun sebelumnya.

Penyusunan RKP mengacu pada regulasi yang tertuang dalam Undang-undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem perencanaan Pembangunan Nasional dan Peraturan Pemerintah Nomor. 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional. RKP tahun 2024 disusun dengan tujuan untuk menjadi acuan dalam perencanaan, penganggaran dan pelaksanaan pembangunan baik oleh pemerintah pusat maupun daerah, serta untuk menjaga kesinambungan kebjakan Rencana Pemerintah Jangka Menengah Nasional (RPJMN) tahun 2020-2024. Bagi Pemerintah Pusat, RKP merupakan acuan K/L dalam Menyusun Rencana Kerja (Renja) K/L serta Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) K/L, yang selanjtnya dituangkan dalam Rancangan Undang-undang (UU) Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN).

Penyusunan Rencana Kerja (RENJA) Balai Pengamanan dan Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan Wilayah Maluku dan Papua Tahun 2024 adalah dokumen perencanaan tahunan kelima di dalam Pelaksanaan Rencana Strategi (RENSTRA) Direktorat Jenderal GAKKUM KLHK tahun 2020 – 2024 dan RENSTRA Balai Pengamanan dan Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan Wilayah Maluku dan Papua tahun 2020 – 2024. Penjelasan Umum RENJA GAKKUM KLHK ini diharapkan dapat memberikan gambaran singkat mengenai sasaran yang akan dicapai, kebijakan yang akan digunakan serta program dan kegiatan yang diprioritaskan oleh Balai Pengamanan dan Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan Wilayah Maluku dan Papua terutama harus dapat secara langsung mencerminkan pencapaian prioritas nasional yang telah ditetapkan.

Bagi BPPHLHK Wilayah Maluku dan Papua yang terkait langsung dengan pencapaian Prioritas Nasional pada tahun 2024, maka program dan kegiatannya harus dapat secara langsung mencerminkan pencapaian prioritas yang telah ditetapkan

B. Kedudukan, Tugas dan Fungsi

Balai Pengamanan dan Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan Wilayah Maluku dan Papua sesuai dengan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2022 tentang Organisasi dan kerja Balai Pengamanan dan Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan diberikan tugas melaksanakan kegiatan penurunan gangguan, ancaman dan pelanggaran hukum lingkungan hidup dan kehutanan.

Fungsi Balai Pengamanan dan Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan :

a. Pelaksanaan inventarisasi dan identifikasi potensi gangguan lingkungan hidup dan kehutanan;
b. Pelaksanaan inventarisasi dan identifikasi potensi ancaman dan pelanggaran hukum lingkungan hidup dan kehutanan;
c. Sosialisasi penegakan hukum lingkungan hidup dan kehutanan;
d. Koordinasi dengan apparat penegak hukum dan pihak terkait lainnya;
e. Pengumpulan data dan informasi pencegahan dan pengamanan hutan;
f. Pelaksanaan kegiatan pencegahan dan operasi pengamanan hutan;
g. Pemberian dukungan dan pelaksanaan operasi penindakan perusakan lingkungan hidup;
h. Pengumpulan bahan dan keterangan, serta penyidikan terhadap pelanggaran hukum lingkungannhidup dan kehutanan;
i. Fasilitasi dan pelaksanaan penyelsaian sengketa lingkungan hidup;
j. Pengawasan penaatan terhadap pemegang perizinan berusaha atau persetujuan pemerintah, dan peraturan perundang-undangan dibidang lingkungan hidup dan kehutanan;
k. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan penegakan hukum lingkungan hidup dan kehutanan; dan
l. Pelaksanaan penyusunan rencana, program, anggaran dan pelaporan, urusan administrasi kepegawaian, keuangan, pengelolaan barang milik negara, tata persuratan, kearsipan, kerumahtanggaan, dan hubungan masyarakat, advokasi hukum, dan pengelolaan data dan informasi.

C. Struktur Organisasi

Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2022

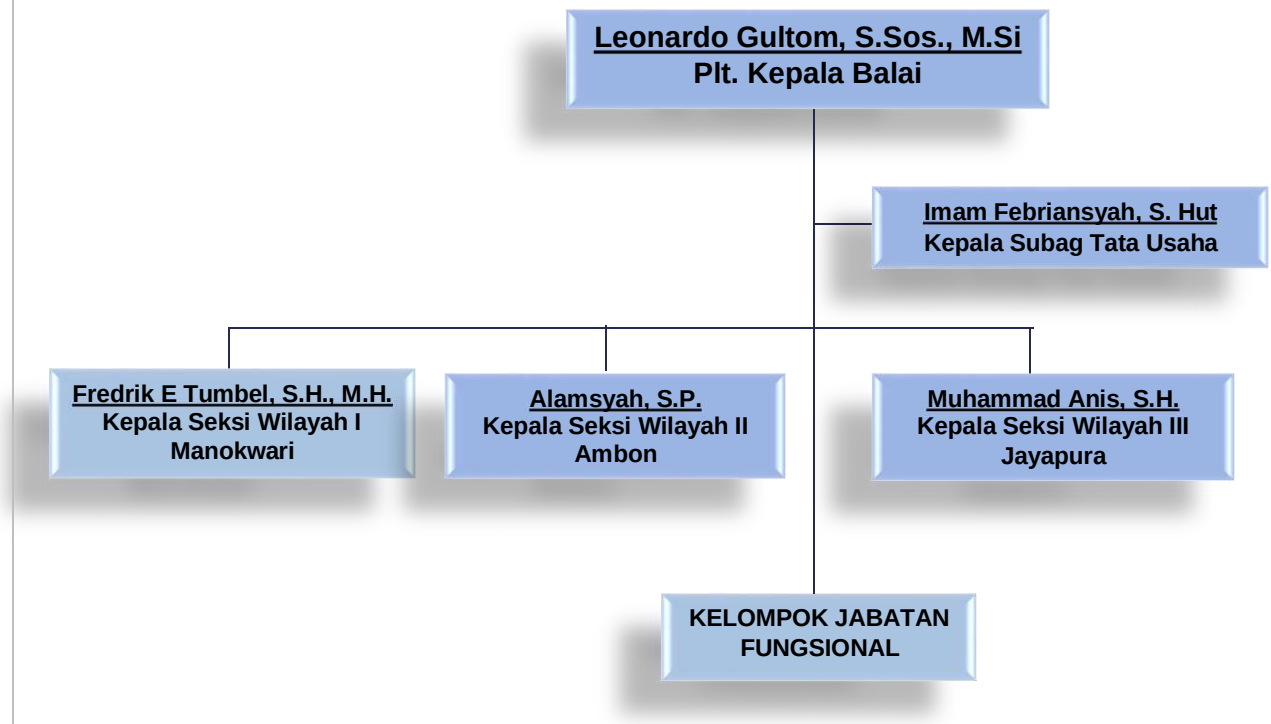

Gambar 1 : Struktur Organisasi BPPHLHK Wilayah Maluku dan Papua

D. Sumber Daya Manusia

Jumlah Sumber Daya Manusia Balai Pengamanan dan Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan Wilayah Maluku dan Papua Per 1 November 2023 tercatat sebanyak 134 Orang dengan rincian :

Statistik SDM Lingkup Balai PNS dan PPNPN

No.	Unit Kerja	Struktural		Fungsional			Pelaksana	TOTAL
		Eselon III	Eselon IV	POLHUT	PPLH	Fungsional Tertentu		
1	Sub Bagian Tata Usaha	0	1	9	3	5	3	20
2	Seksi Wilayah I Manokwari	0	1	32	3	0	2	38
3	Seksi Wilayah I Ambon	0	1	21	4	1	2	28
4	Seksi Wilayah I Jayapura	0	1	32	4	0	0	37
TOTAL		**0**	**4**	**95**	**14**	**4**	**6**	**123**

Tabel 1 : Sebaran PNS pada Balai Gakkum LHK Wilayah Maluku dan Papua Per Seksi Wilayah

No	Unit Kerja	Staf PPNPN
1	Sub Bagian Tata Usaha	4
2	Seksi Wilayah I Manokwari	1
3	Seksi Wilayah II Ambon	3
4	Seksi Wilayah III Jayapura	2
TOTAL		**10**

Tabel 2 : Sebaran PPNPN pada pada Balai Gakkum LHK Wilayah Maluku dan Papua Per Seksi Wilayah

Statistik SDM berdasarkan Pangkat

Pangkat/Gol.	Maluku dan Papua				
	TU	I	II	III	Total
I/a – I/d	-	-	-	-	0
IIa – II/d	3	6	8	3	20
III/a – III/d	17	29	19	32	97
IV/a – IV/e	0	3	1	2	6
TOTAL Pegawai	**20**	**38**	**28**	**37**	**123**

Tabel 3 : Tabel jumlah ASN pada pada Balai Gakkum LHK Wilayah Maluku dan Papua sesuai dengan Pangkat

Statistik SDM Sesuai dengan Jenis Kelamin

A. Status PNS

No	Unit Kerja	Jenis Kelamin		Total
		Laki - Laki	Perempuan	
1	Sub Bagian Tata Usaha	16	4	20
2	Seksi Wilayah I Manokwari	36	2	38
3	Seksi Wilayah II Ambon	23	5	28
4	Seksi Wilayah III Jayapura	35	2	37
TOTAL		**110**	**13**	**123**

B. Status PPNPN

No	Unit Kerja	Jenis Kelamin		Total
		Laki - Laki	Perempuan	
1	Sub Bagian Tata Usaha	1	3	4
2	Seksi Wilayah I Manokwari	1	-	1
3	Seksi Wilayah II Ambon	2	1	3
4	Seksi Wilayah III Jayapura	1	1	2
TOTAL		**5**	**5**	**10**

Tabel 4 : Tabel jumlah ASN dan PPNPN sesuai dengan Jenis Kelamin

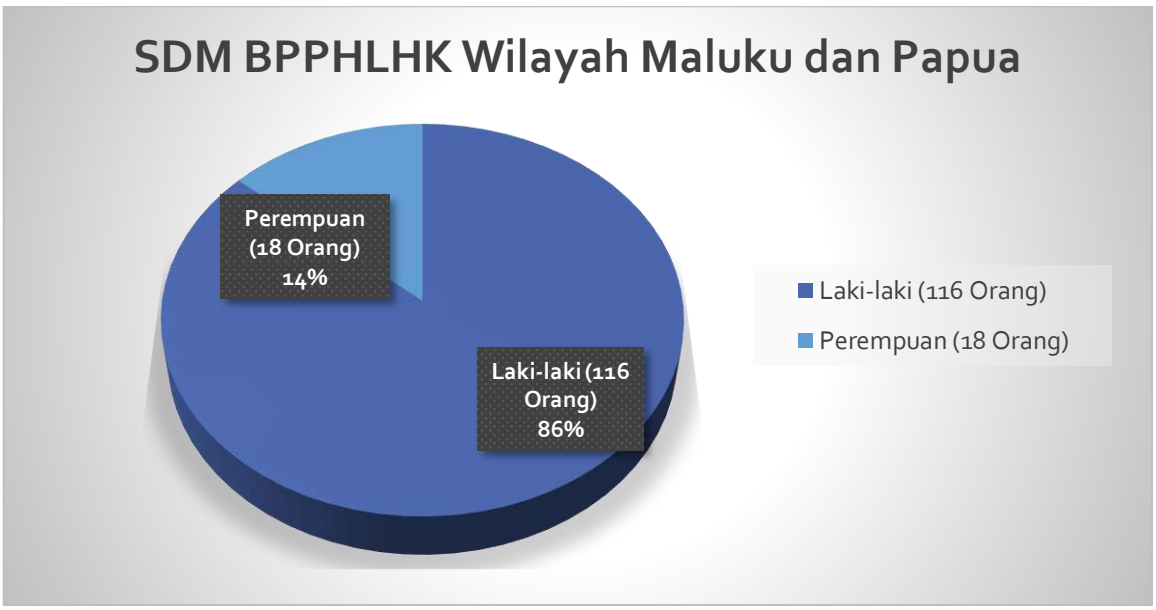

Gambar 2 : Gambar Jumlah SDM BPPHLHK Wilayah Maluku dan Papua berdasarkan Jenis Kelamin

Statistik SDM Sesuai dengan Tingkat Pendidikan

A. Status PNS

No	Unit Kerja	Tingkat Pendidikan					
		S3	S2	S1/D-IV	D-III	SLTA	TOTAL
1	Sub Bagian Tata Usaha	-	-	15	2	3	20
2	Seksi Wilayah I Manokwari	-	2	19	2	14	38
3	Seksi Wilayah II Ambon	-	-	15	1	12	28
4	Seksi Wilayah III Jayapura	-	-	23	1	13	37
	TOTAL	-	2	73	6	42	123

B. Status PPNPN

No	Unit Kerja	Tingkat Pendidikan					
		S3	S2	S1/D-IV	D-III	SLTA	TOTAL
1	Sub Bagian Tata Usaha	-	-	2	-	2	4
2	Seksi Wilayah I Manokwari	-	-	1	-	-	1
3	Seksi Wilayah II Ambon	-	-	-	-	3	3
4	Seksi Wilayah III Jayapura	-	-	1	-	1	2
	TOTAL			**4**		**6**	**10**

Tabel 5 : Tabel jumlah ASN dan PPNPN berdasarkan Pendidikan

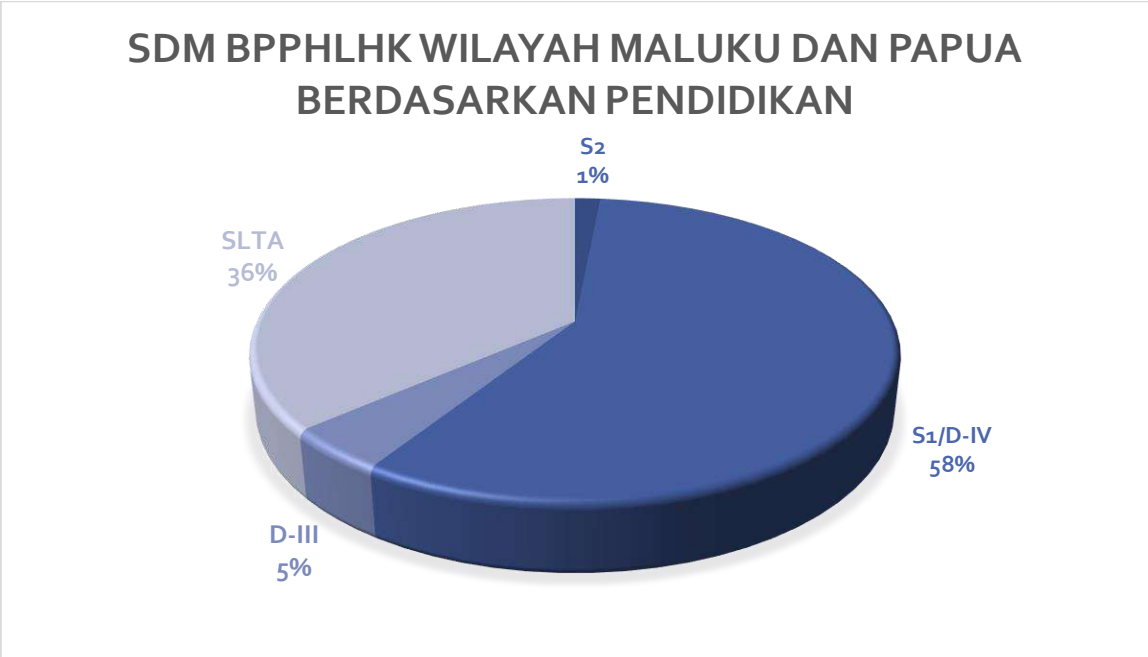

Gambar 3 : Gambar Jumlah SDM BPPHLHK Wilayah Maluku dan Papua berdasarkan Pendidikan

Statistik SDM berdasarkan Usia

A. Status PNS

NO	Unit Kerja	Usia (Th)				Total
		<30	31-40	41-50	>50	
1	Sub Bagian Tata Usaha	5	8	5	3	21
2	Seksi Wilayah I Manokwari	6	7	16	9	38
3	Seksi Wilayah II Ambon	8	11	5	4	28
4	Seksi Wilayah III Jayapura	3	10	10	14	37
	Total	22	36	36	30	124

B. Status PPNPN

NO	Unit Kerja	Usia (Th)				Total
		<30	31-40	41-50	>50	
1	Sub Bagian Tata Usaha	2	-	2	-	4
2	Seksi Wilayah I Manokwari	-	1	-	-	1
3	Seksi Wilayah II Ambon	1	1	1	-	3
4	Seksi Wilayah III Jayapura	1	1	-	-	2
	Total	4	3	3		10

Tabel 6 : Tabel jumlah ASN dan PPNPN berdasarkan Usia

Statisik Jumlah Penyidik Pegawai Negeri lingkup Balai Gakkum LHK Wilayah Maluku dan Papua

No	Unit Kerja	Jumlah	Total
1	Sub Bagian Tata Usaha	2	**23**
2	Seksi Wilayah I Manokwari	10	
3	Seksi Wilayah II Ambon	4	
4	Seksi Wilayah III Jayapura	7	
TOTAL		**23**	

Tabel 7 : Jumlah PPNS berdasarkan Wilayah Kerja

Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) adalah Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang yang menjadi dasar hukumnya untuk melakukan penyidikan. Jumlah PPNS pada Balai Pengamanan dan Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan Wilayah Maluku dan Papua sebanyak 23 Orang. Jumlah PPNS sebanyak 23 Orang Laki-laki yang tersebar di Wilayah kerja Papua Barat, Papua Barat Daya, Papua, Papua Selatan, Maluku dan Maluku Utara.

Dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dan terbitnya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 15/PUU-XIX/2021, dasar hukum kewenangan **PPNS yang bertugas di instansi lingkungan hidup dan kehutanan untuk melakukan penegakan hukum bertambah menjadi** 8 (delapan) undang-undang, yaitu:

1. Undang-Undang Nomor 5 tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya.
2. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan.
3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengeloalaan Sampah.
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
5. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.
6. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan.
7. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2014 tentang Konservasi Tanah dan Air.
8. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.

Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup adalah Pegawai Negeri Sipil yang diberikan tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak secara penuh oleh pejabat berwenang untuk melakukan pengawasan dan/atau penegakan hukum lingkungan, untuk mengetahui dan/atau menetapkan tingkat ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan atas ketentuan yang ditetapkan dalam perizinan berusaha atau persetujuan pemerintah serta peraturan perundang-undangan di bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Polisi Kehutanan Indonesia atau biasa disebut **Polhut** adalah jabatan fungsional Pegawai Negeri Sipil dalam lingkungan pegawai instansi kehutanan pusat maupun daerah yang mempunyai tugas pokok yaitu menyiapkan, melaksanakan, mengembangkan, memantau, dan mengevaluasi serta melaporkan kegiatan **perlindungan dan pengamanan hutan** serta **pengawasan peredaran hasil hutan**.

Polhut memiliki satuan reaksi cepat yang disebut **SPORC** (Satuan Polhut Reaksi Cepat) yang dibentuk tahun 2005. Satuan Khusus Polisi Kehutanan Reaksi Cepat yang selanjutnya disingkat SPORC adalah satuan dalam polisi kehutanan yang ditingkatkan kualifikasinya untuk menanggulangi gangguan keamanan hutan secara cepat, tepat dan akurat.

Untuk diwilayah kerja Balai Pengamanan dan Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan kehutanan Wilayah Maluku dan Papua terdapat 3 (tiga) Brigade SPORC diantaranya : Brigade Kasuari (Papua Barat, Papua Barat Daya), Brigade Kakatua (Maluku, Maluku Utara), Brigade Kanguru (Papua, dan Papua Selatan)

E. Sarana dan Prasarana

Untuk mendukung kinerja sumber daya manusianya, sarana dan prasarana yang andal sesuai dengan kebutuhan dan fungsi harus dipenuhi. Sebab, sarana dan prasarana yang tepat guna akan mampu meningkatkan efektifitas dan efisiensi suatu pelaksanaan tugas. Seperti yang dijabarkan data dibawah, berikut beberapa sarana prasarana untuk mendukung tugas aparat dilapangan.

Balai Pengamanan dan Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan Wilayah Maluku dan Papua telah menyediakan sarana prasarana berbagai jenis. Berikut merupakan rincian sarana prasarana yang dimaksud:

No	Aset Tetap	Kode	Satuan	Kuantitas	Nilai Perolehan (Rp)
A	**Tanah**	**131111**		20.000	**27.065.718.000**
1	Tanah Padang Alang-alang	2.01.02.06.001	m^2	20.000	9.068.630.000
B	**Peralatan dan Mesin**	**132111**		821	**19.514.783.312**
1	Pompa Air	3.01.03.05.010	unit	1	2.000.000
2	Spy Hidden Camera	3.01.03.15.002	unit	5	5.000.000
	Alat Bantu Lainnya (Komputer Tablet)	3.01.03.99.999	Unit	13	80.878.000
3	Jeep	3.02.01.01.002	unit	2	665.980.000
4	Mini Bus (Penumpang 14 Orang Ke Bawah)	3.02.01.02.003	unit	3	1.038.000.000
5	Pick Up	3.02.01.03.002	unit	13	5.458.000.000
6	Sepeda Motor	3.02.01.04.001	unit	56	1.269.016.300
7	Sepeda Motor Patroli	3.02.01.04.004	unit	5	174.146.000
	Kendaraan Bermotor Roda Dua Lainnya	3.02.01.04.999	Unit	3	93.050.000
8	Mobil Unit Tahanan	3.02.01.05.020	unit	1	700.000.000
9	Mobil Patroli	3.02.01.05.086	unit	2	907.934.379
10	Lemari Penyimpan	3.04.01.04.004	buah	8	39.400.500
11	Lemari Besi/Metal	3.05.01.04.001	buah	22	113.104.000
12	Lemari Kayu	3.05.01.04.002	buah	11	68.926.000
13	Filing Cabinet Besi	3.05.01.04.005	buah	14	51.370.000
14	Brankas	3.05.01.04.007	buah	1	10.000.000
15	Buffet	3.05.01.04.013	buah	20	260.700.000
16	Lemari Penyimpanan Senjata	3.05.01.04.028		2	30.000.000
17	CCTV	3.05.01.05.007	buah	8	107.560.000
18	Papan Visual/Papan Nama	3.05.01.05.008	buah	3	23.000.000

No	Aset Tetap	Kode	Satuan	Kuantitas	Nilai Perolehan (Rp)
19	Alat Penghancur Kertas	3.05.01.05.015	buah	4	20.796.360
20	Mesin Absensi	3.05.01.05.017	buah	4	11.137.000
21	LCD Projector/Infocus	3.05.01.05.048	buah	11	66.036.000
22	Focusing Screen/Layar LCD Projector	3.05.01.05.058	buah	1	1.850.000
23	Vacum Freeze Dry Chamber	3.05.01.05.069	buah	1	2.550.000
24	Perkakas Kantor Lainnya	3.05.01.05.999	Buah	1	9.900.000
25	Alat Kantor Lainnya	3.05.01.99.999	Buah	4	96.800.000
	Meja Kerja Besi/Metal	3.05.02.01.001	Buah	7	21.588.000
26	Meja Kerja Kayu	3.05.02.01.002	buah	131	475.467.000
27	Kursi Besi/Metal	3.05.02.01.003	buah	196	253.426.000
28	Kursi Kayu	3.05.02.01.004	buah	22	38.000.000
29	Sice	3.05.02.01.005	buah	14	182.378.000
30	Meja Rapat	3.05.02.01.008	buah	7	77.096.000
	Tempat Tidur Kayu	3.05.02.01.011	Buah	1	2.000.000
31	Meja Resepsionis	3.05.02.01.014	buah	1	27.060.000
32	Kasur/Spring Bed	3.05.02.01.016	buah	4	22.000.000
	Sofa	3.05.02.01.033	Set	1	14.739.000
33	Meubelair Lainnya	3.05.02.01.999		4	12.210.000
34	Mesin Pemotong Rumput	3.05.02.03.003	buah	3	10.430.000
35	Lemari Es	3.05.02.04.001	buah	12	44.015.000
36	AC Sentral	3.05.02.04.002	buah	1	15.400.000
37	AC Split	3.05.02.04.004	buah	35	170.176.373
	Portable Air Conditioner	3.05.02.04.005	Buah	4	17.301.000
	Kipas Angin	3.05.02.04.006	Buah	4	12.065.160
38	Treng Air/Tandon Air	3.05.02.05.011	buah	1	18.000.000
39	Televisi	3.05.02.06.002	buah	17	96.273.000
40	Sound System	3.05.02.06.008	buah	2	52.500.000
	Wireless	3.05.02.06.012	buah	1	2.442.000
41	Tangga Aluminium	3.05.02.06.034	buah	2	6.950.000
42	Dispenser	3.05.02.06.036	buah	8	18.351.700
	Mimbar/Podium	3.05.02.06.037	Buah	1	6.000.000
43	Lambang Instansi	3.05.02.06.042	buah	5	11.000.000
44	Handy Cam	3.05.02.06.046	buah	2	20.430.000
45	Gordyin/Kray	3.05.02.06.058	buah	1	47.432.000

No	Aset Tetap	Kode	Satuan	Kuantitas	Nilai Perolehan (Rp)
46	Kabel	3.05.02.06.071	buah	1	5.984.000
	Microphone/Wireless Mic	3.06.01.01.036	Buah	2	7.767.170
47	UPS	3.06.01.01.048	buah	19	67.900.000
48	Lensa Kamera	3.06.01.02.061	buah	5	5.000.000
49	Kamera Under Water	3.06.01.02.127	buah	2	14.500.000
50	Camera Digital	3.06.01.02.128	buah	8	172.240.000
51	LCD Monitor	3.06.01.02.135	buah	3	11.055.000
	Camera Conference	3.06.01.02.165	Buah	1	25.000.000
	Drone	3.06.01.02.167	Buah	1	50.241.930
	Mesin Cetak	3.06.01.04.006	Buah	3	7.400.000
52	Kamera Udara	3.06.01.05.047	buah	11	659.548.000
53	Pesawat Telephone	3.06.02.01.003	buah	2	3.991.000
54	HT	3.06.02.01.006	buah	36	427.150.000
55	Faximile	3.06.02.01.010	buah	1	3.000.000
56	Wireless Amplifier	3.06.02.06.002	buah	3	24.130.000
	Handphone	3.06.02.07.017	buah	3	15.297.000
57	Peralatan Antena SHF/Parabola Lainnya	3.06.03.10.999		1	3.500.000
58	Genset	3.06.03.47.002	buah	4	80.275.000
59	Clinical Thermometer	3.07.01.01.049	buah	1	50.000.000
60	Kursi Dorong	3.07.01.01.127	buah	32	74.580.000
	Mesin Potong Jerami	3.08.01.11.127	Buah	1	1.914.000
61	Pistol	3.09.01.01.002	buah	1	2.500.000
62	Sejata Genggam Lainnya	3.09.01.01.999		1	38.905.500
63	Senapan Semi Otomatis	3.09.01.03.002	buah	10	36.000.000
64	Senjata Bahu/Senjata Laras Panjang Lainnya	3.09.01.03.999		38	1.326.000.000
65	HP Satelite	3.09.04.01.004	buah	10	133.963.000
66	Kamera Digital	3.09.04.02.031	buah	10	55.550.000
67	GPS	3.09.04.03.004	buah	11	111.706.000
68	Rompi Anti Peluru	3.09.04.03.012	buah	23	322.000.000
69	Digital Camera	3.09.04.04.004	buah	2	38.000.000
70	Lemari Kamera	3.09.04.07.005	buah	9	62.250.000
71	PC Unit	3.10.01.02.001	buah	19	247.570.000
72	Laptop	3.10.01.02.002	buah	97	1.802.756.000
	Tablet PC	3.10.01.02.009	buah	1	11.198.000
73	Hardisk	3.10.02.01.012	buah	1	1.000.000
74	CPU (Peralatan PC)	3.10.02.03.001	buah	1	84.425.000

No	Aset Tetap	Kode	Satuan	Kuantitas	Nilai Perolehan (Rp)
75	Printer (Peralatan PC)	3.10.02.03.003	buah	74	297.901.100
76	Scanner (Peralatan PC)	3.10.02.03.004	buah	15	229.715.860
	Alat Tenis Meja	3.19.01.02.001	Buag	2	21.090.000
C	**Gedung dan Bangunan**	**133111**		**13**	**5.057.792.000**
1	Bangunan Gedung Kantor Permanen	4.01.01.01.001	Unit	1	749.048.000
2	Bangunan Gedung Tempat Ibadah Permanen	4.01.01.08.001	Unit	1	85.366.000
3	Gedung Pos Jaga Permanen	4.01.01.13.001	Unit	1	26.079.000
4	Gedung Garasi/Pool Permanen	4.01.01.14.001	Unit	1	269.708.000
5	Bangunan untuk Kadang	4.01.01.29.001	Unit	2	90.448.000
6	Taman Permanen	4.01.01.34.001	Unit	1	932.838.000
7	Rumah Negara Golongan II Tipe C Permanen	4.01.02.02.007	Unit	1	171.621.000
8	Rumah Negara Golongan II Tipe D Permanen	4.01.02.02.010	Unit	3	373.404.000
9	Pagar Permanen	4.04.01.04.001	Unit	1	1.748.145.000
10	Pagar Semi Permanen	4.04.01.04.002	Unit	1	611.135.000
D	**Jalan dan Jembatan**	**134111**		**133**	**187.071.000**
1	Jalan Khusus Kompleks	5.01.01.09.002	M2	133	187.071.000
E	**Jaringan**	**134113**		**4**	**31.406.220**
1	Jaringan Sambungan ke Rumah Kapasitas Besar	5.04.01.04.003	Unit	4	31.406.220
F	**Aset Tetap Yang Tidak Digunakan**	**166112**		**99**	**1.674.955.720**
1	Mini Bus (Penumpang 14 Orang Kebawah)	3.02.01.02.003	Unit	1	248.350.000
3	Sepeda Motor	3.02.01.04.001	Unit	9	153.700.000
4	Sepeda Motor Patroli	3.02.01.04.004	Unit	2	10.000.000
5	Mobil Patroli	3.02.01.05.086	Unit	1	248.350.000
6	Lemari Besi/Metal	3.05.01.04.001	Buah	1	248.000

No	Aset Tetap	Kode	Satuan	Kuantitas	Nilai Perolehan (Rp)
7	Filling Cabinet Besi	3.05.01.04.005	Buah	1	731.000
8	Mesin Absensi	3.05.01.05.017	Buah	2	4.785.000
9	Meja Kerja Kayu	3.05.02.01.002	Buah	14	41.030.000
10	Kursi Besi/Metal	3.05.02.01.003	Buah	24	16.980.480
11	Sice	3.05.02.01.005	Buah	2	14.270.000
12	Meja Rapat	3.05.02.01.008	Buah	4	8.256.000
13	Meja Komputer	3.05.02.01.009	Buah	1	1.000.000
14	Kasur/Spring Bed	3.05.02.01.016	Buah	1	6.000.000
15	Lemari Es	3.05.02.04.001	Buah	1	2.500.000
16	AC Split	3.05.02.04.004	Buah	1	4.900.000
17	Kipas Angin	3.05.02.04.006	Buah	2	1.700.000
18	Televisi	3.05.02.06.002	Buah	1	4.450.000
19	Megaphone	3.05.02.06.013	Buah	1	1.371.240
20	Dispenser	3.05.02.06.036	Buah	1	2.905.000
21	Mesin Potong	3.06.01.04.031	Buah	1	4.000.000
22	GPS Receiver	3.06.01.05.038	Buah	1	7.000.000
23	Faximile	3.06.02.01.010	Buah	1	3.000.000
24	Unit Tranceiver Ssb Stationery	3.06.02.02.003	Buah	1	17.496.000
25	Unit Tranceiver VHF Stationery	3.06.02.04.003	Buah	1	81.495.000
26	Kursi Dorong	3.07.01.01.127	Buah	5	8.630.000
27	Mobile Lab. Met System Solar Power Panel	3.08.01.53.007	Buah	1	49.448.000
28	Finger Print Camera	3.09.04.07.035	Buah	1	5.984.000
29	PC Unit	3.10.01.02.001	Buah	4	30.325.000
30	Laptop	3.10.01.02.002	Buah	3	50.992.000
31	Printer (Peralatan PC)	3.10.02.03.003	Buah	8	19.057.000
32	Bangunan Olahraga Terbuka Permanen	4.01.01.11.004	Unit	1	22.579.000
33	Dermaga	5.01.02.11.001	M2	1	603.423.000
TOTAL					**53.531.726.252**

Tabel 8 : Jumlah Sarana dan Prasarana pada BPPHLHK Wilayah Maluku dan Papua

F. Pengarusutamaan Gender

4 (empat) Prioritas dan Sasaran Road Map pengarusutamaan Gender (PUG) Ditjen Gakkum LHK TA. 2020 – 2024, diantaranya:

a. Peningkatan Kapasitas Staff untuk Mengimplementasikan Practical Gender Concern
   - Meningkatkan pengetahuan tentang konsep gender dan penghapusan stereotip gender dikalangan Ditjen Gakkum LHK terkhususnya Balai PPHLHK Wilayah Maluku dan Papua
   - Memastikan pemahaman Bersama mengenai kesetaraan gender melalui perubahan kelembangaan serta implikasinya dan komitmen terhadap anti pelecehan dan eksploitasi seksual.
b. Mewujudkan Lingkungan Kerja yang Sensitif Gender
   - Fasilitas yang Responsif Gender dilingkungan Kerja dilingkungan kerja Ditjen Gakkum LHK terkhususnya di Balai PPHLHK Wilayah Maluku dan Papua
c. Pengarusutamaan Gender dalam Reformasi Kebijakan dan Peraturan
   - Pengembnagan kebijakan dan peraturan dalam kerangka yang responsive gender dalam lingkungan Ditjen Gakkum LHK dan Balai PPHLHK Wilayah Maluku dan Papua
   - Pembentukan Sistem dan Meanisme Pengaduan yang responsive Gender
d. Monitoring dan Evaluasi yang Responsif Gender
   - Mekanisme Pemantauan dan Evaluasi yang responsive gender yang dapat menggambarkan manfaat program dan dampak yang berbeda pada perempuan dan laki-laki

G. Kewenangan Konkuren Bidang Kehutanan

Isu strategis bidang kehutanan di daerah yaitu kejahatan dan perdagangan ilegal TSL, pengendalian dan dampak kebakaran hutan dan lahan, peran cabang dinas kehutanan, keterbatasan Pemda terkait anggaran, sumber daya manusia, sarana prasarana dan kebijakan daerah.

Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah

Masukan Ditjen Penegakan Hukum LHK pada Bidang Kehutanan

"Perlindungan Hutan dilakukan dalam bentuk kegiatan pencegahan dan Pemberantasan kerusakan Kawasan hutan dan peredaran hasil hutan illegal melalui :

1. Deteksi dini;
2. Pre-emtif;
3. Preentif;
4. Pengawasan Tindakan Administrasi; dan
5. Operasi Represif

Dalam urusan Pemerintahan Bidang Kehutanan Program terbagi 2 :

A. Program Pengelolaan Hutan

   Kegiatan pelaksanaan perlindungan hutan di hutan lindung dan Produksi

   - Luasan Kawasan Hutan yang dilakukan Pengamanan Hutan
   - Jumlah operasi Peredaran hasil Hutan illegal logging dan TSL
   - Jumlah Polisi Kehutanan yang ditingkatkan Kapasitasnya dan Komptesinya dan
   - Jumlah PPNS yang ditingkatkan Kapasitasnya

B. Program Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistemnya

   Kegiatan Pengelolaan Taman Hutan Raya (TAHURA) – Provinsi dan Kab/ Kota

   - Luas Kawasan Tahura Provinsi dan/ atau Kabupaten Kota yang diamankan
   - Peredaran hasil hutan di Tahura Kabupaten/ Kota yang diamankan
   - Kasus Tindak Pidana Kehutanan (P21)
   - Jumlah Polisi Kehutanan yang di Tingkatkan Kapasitasnya dan Kompetensinya.

H. Kewenangan Konkuren Bidang Lingkungan

Isu strategis bidang lingkungan di daerah yaitu penegakan hukum lingkungan, sampah, limbah industri/domestik/usaha skala kecil, limbah medis, kebakaran hutan dan lahan, bahan berbahaya dan beracun (B3), penambangan tanpa izin, sampah spesifik, limbah cair domestik, pencemaran industri berbasis lahan, reklamasi pasca tambang (pengawasan dan akuntabilitas), pembuangan limbah minyak, keterbatasan pemerintah daerah terkait anggaran, SDM, sarana prasarana dan kebijakan daerah.

Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah
Masukan Ditjen Penegakan Hukum LHK pada Bidang Lingkungan Hidup
"Ruang lingkuo Penegakan Hukum Bidang Lingkungan Hidup yang merupakan kewenangan Provinsi dan Kabupaten/ Kota"

Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup

A. Program Pembinaan dan Pengawasan terhadap izin Lingkungan dan izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)
   - Pembentukan Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup
   - Pengembangan Kapasitas Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup
   - Pengawasan Perizinan berusaha atau persetujuan pemerintah terkait persetujuan lingkungan yang ditertibkan oleh Pemerintah Daerah dan Peraturan Perundang-indangan dan pengelolaan Lingkungan Hidup
B. Program Pengelolaan Pengaduan Permasalahan Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup
   - Penerapan Sanksi Administrasi
   - Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup
   - Penyelesaian Kasus Tindak Pidana Lingkungan Hidup (P-21)
   - Pembentukan dan Peningkatan Kapasitas Penyidik PNS LHK

I. Reformasi Birokrasi BPPHLHK Wilayah Maluku dan Papua

Dalam upaya meningkatkan kinerja dan efisiensi Direktorat Jenderal Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Ditjen Gakkum LHK) termasuk Satker Balai Pengamanan dan Penegakan Hukum LHK Wilayah Maluku dan Papua, terdapat delapan area perubahan yang diarahkan untuk memperkuat transformasi birokrasi. Langkah-langkah ini bertujuan untuk menjadikan institusi ini sebagai entitas publik yang modern, unggul, dan berintegritas.

Gambar 4: Reformasi Birokrasi BPPHLHK Wilayah Maluku dan Papua

KINERJA PEMBANGUNAN REFORMASI BIROKRASI

Perubahan paradigma pembangunan Reformasi Birokrasi (RB) pada pertengahan tahun 2023 menghadirkan terobosan signifikan yang diinisiasi oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB). Dua fokus utama diperkenalkan sebagai strategi pelaksanaan RB, yang dikenal sebagai *'double track'.* Dua fokus ini terbagi menjadi RB General, yang memusatkan perhatian pada penyelesaian isu hulu, dan RB Tematik, yang berfokus pada penyelesaian isu hilir.

Penting untuk dicatat bahwa pada tahun 2023, kegiatan RB tidak lagi terkait dengan delapan area perubahan sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri PANRB Nomor 25 Tahun 2020. Sebaliknya, pendekatan yang diambil lebih berfokus pada pelaksanaan kegiatan percepatan, sesuai dengan ketentuan yang dijelaskan dalam Peraturan Menteri PANRB Nomor 3 Tahun 2023.

Perubahan ini mencerminkan evolusi dalam pembangunan Reformasi Birokrasi, di mana penekanan diberikan pada upaya percepatan untuk mencapai hasil yang lebih tangkas dan terukur. Dengan adanya dualitas fokus antara RB General dan RB Tematik, diharapkan upaya reformasi birokrasi dapat lebih tepat sasaran sesuai dengan kompleksitas isu yang dihadapi di tingkat hulu dan hilir. Penerapan strategi *'double track'* ini diharapkan membawa dampak positif terhadap kinerja birokrasi, mempercepat pencapaian tujuan reformasi, dan memastikan ketangguhan sistem administrasi pemerintahan di tengah perubahan dinamis di berbagai sektor.

Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) telah melaksanakan mandat dari Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Nomor 3 Tahun 2023. Dalam konteks RB Tematik, Kementerian LHK berhasil berkontribusi dalam menyelesaikan keempat dari empat program prioritas nasional yang tercantum dalam sektoral RB Tematik tahun 2020-2024. Pelaksanaan program ini dipandu oleh beberapa unit eselon I yang ditunjuk sebagai koordinator (*leading unit*), menunjukkan keterlibatan penuh dalam mendukung upaya reformasi di sektor lingkungan hidup dan kehutanan. Melalui peran proaktif dan koordinatif dari unit eselon I sebagai leading unit serta distribusi indeks pada seluruh unit kerja, Kementerian LHK berkomitmen untuk menciptakan perubahan positif dalam struktur dan kinerja birokrasi, mendukung visi pembangunan nasional, dan meningkatkan efektivitas layanan publik di bidang lingkungan hidup dan kehutanan.

RB General
RB memperbaiki manajemen internal seluruh instansi pemerintah (*problem hulu*)

- Tata kelola pemerintahan digital yang efektif, lincah dan kolaboratif
- Budaya birokrasi BerAKHLAK dengan ASN profesional

RB Tematik
RB mempercepat pelaksanaan agenda pembangunan nasional (*problem hilir*)

INDIKATOR CAPAIAN REFORMASI BIROKRASI GENERAL

Persentase Penyederhanaan Struktur Organisasi	Tingkat Capaian Sistem Kerja Untuk Penyederhanaan Birokrasi
Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA)	Tingkat Maturitas SPIP
Tingkat Keberhasilan Pembangunan Zona Integritas	Nilai SAKIP
Indeks Perencanaan Pembangunan	Tingkat Implementasi Kebijakan Arsitektur SPBE
Tingkat Digitalisasi Arsip	Transformasi Layanan Digital
Indeks Pengelolaan Aset	Tingkat Tindak Lanjut Pengaduan Masyarakat (LAPOR) Yang Diseleselesaikan
Indeks Kualitas Kebijakan	Indeks Reformasi Hukum
Tingkat Kematangan Penyelenggaraan Statistik Sektoral	Indeks Tata Kelola Pengadaan
Indeks Sistem Merit	Indeks Pelayanan Publik

II. CAPAIAN KINERJA TAHUN 2020-2023 DAN PROGNOSIS TAHUN 2024

A. Capaian Indikator Kinerja Kegiatan Tahun 2022 – 2023 dan Prognosis Tahun 2024

Balai Pengamanan dan Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan Wilayah Maluku dan Papua telah melaksanakan berbagai tindakan penegakan hukum secara konsisten yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Tujuannya untuk meningkatkan budaya ketaatan dari pelaku usaha dan memberikan efek jera bagi pelaku kejahatan lingkungan hidup dan kehutanan. Lingkungan yang baik dan sehat merupakan hak asasi konstitusional bagi setiap warga Indonesia.

Oleh karena itu, negara, pemerintah, dan seluruh pemangku kepentingan berkewajiban untuk melakukan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dalam pelaksanaan pembangunan berkelanjutan agar lingkungan dapat tetap menjadi sumber dan hidup Indonesia sebagai penunjang hidup bagi rakyat Indonesia serta makhluk hidup lain. Seiring tahun terakhir RPJMN 2020 s.d 2024, sesuai Permen LHK P.51 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja lingkup Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan perlu mencantumkan Capaian T-1 dan Prognosis di tahun berjalan (Tahun 2023).

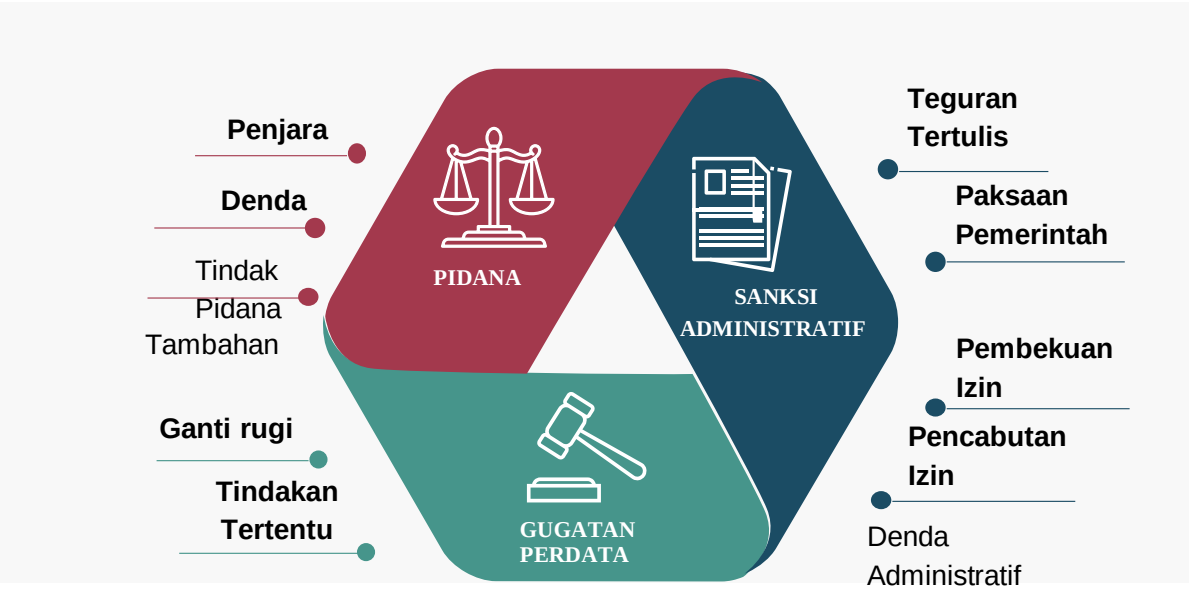

a. IKK dan Target Kinerja Balai Pengamanan dan Penegakan Hukum LHK Wilayah Maluku dan Papua sesuai dengan Renstra 2020-2024

No	Program/ Keg/ Sasaran/ IKP/ IKK	Target Kinerja (Volume Satuan)				
		2020	2021	2022	2023	2024
1	Layanan Dukungan Manajemen Eselon I	1 Layanan	1 Layanan	1 Layanan	1 Layanan	1 Layanan
2	Layanan Perkantoran	1 Layanan	1 Layanan	1 Layanan	1 Layanan	1 Layanan
3	Luas Hutan yang diamankan dari gangguan dan ancaman bidang kehutanan	270.000 Ha	300.000 Ha	340.000 Ha	340.000 Ha	340.000 Ha
4	Jumlah Operasi Pengamanan Kawasan Hutan	11 Operasi	14 Operasi	16 Operasi	18 Operasi	20 Operasi
5	Jumlah Operasi peredaran Hasil Hutan	14 Operasi	31 Operasi	38 Operasi	48 Operasi	50 Operasi
6	Jumlah Polhut yang ditingkatkan kemampuannya	0	95 Orang	98 Orang	102 Orang	105 Orang
7	Penanganan Pengaduan Perusahaan	41 Perusahaan	61 Perusahaan	70 Perusahaan	80 Perusahaan	86 Perusahaan
8	Penanganan Pengaduan Non Perusahaan	84 Aduan	133 Aduan	158 Aduan	191 Aduan	215 Aduan
9	Pengawasan Bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan	20 Pengawasan	30 Pengawasan	34 Pengawasan	39 Pengawasan	42 Pengawasan
10	Kasus Lingkungan hidup dan kehutanan yang diselesaikan (P21)	10 Kasus	17 Kasus	19 Kasus	22 Kasus	26 Kasus
11	Kapasitas PPNS LHK yang ditingkatkan	4 Orang	5 Orang	5 Orang	8 Orang	8 Orang

Tabel 9: IKK dan Target Kinerja Balai Pengamanan dan Penegakan Hukum LHK Wilayah Maluku dan Papua sesuai dengan Renstra 2020-2024

a. Capaian Kinerja Utama Tahun 2020 sebagai berikut :

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian (%)
Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Ditjen PHLHK	Layanan Dukungan Manajemen Satuan Kerja dan Layanan Perkantoran	1	1	100
Terlaksananya Operasi Pengamanan Hutan dan Peredaran Hasil Hutan	Jumlah Operasi Pengamanan Kawasan Hutan	11	11	100
	Jumlah Operasi Peredaran Hasil Hutan Illegal	14	14	100
	Penguatan Fungsi Pencegahan dan Pengamanan Hutan	0	0	100
Terawasinya Usaha dan/ atau kegiatan terhadap Izin Lingkungan dan Peraturan Perundang-undangan terkait Bidang LHK	Penanganan Pengaduan Perusahaan	41	41	100
	Penanganan Perusahaan Non Perusahaan			
	Pengawasan bidang LHK			
Terlaksananya Penegakan Hukum Pidana Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Kasus Pidana LHK yang diselesaikan sampai dengan P21	10	10	100
	Peningkatan Kapasitas Penegakan Hukum Pidana LHK	4	4	100

Tabel 10. Capaian Kinerja Utama Tahun 2020

b. Capaian Kinerja Utama Tahun 2021 sebagai berikut :

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian (%)
Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Ditjen PHLHK	Layanan Dukungan Manajemen Satuan Kerja dan Layanan Perkantoran	1 Tahun	1 Tahun	100
Terlaksananya Operasi Pengamanan Hutan dan Peredaran Hasil Hutan	Jumlah Operasi Pengamanan Kawasan Hutan	3 Operasi	4 Operasi	120
	Jumlah Operasi Peredaran Hasil Hutan Illegal	3 Operasi	3 Operasi	100
	Penguatan Fungsi Pencegahan dan Pengamanan Hutan	50 Orang	50 Orang	100
Terawasinya Usaha dan/ atau kegiatan terhadap Izin Lingkungan dan Peraturan Perundang-undangan terkait Bidang LHK	Penanganan Pengaduan Perusahaan	19 Perusahaan	33 Perusahaan	170
	Penanganan Perusahaan Non Perusahaan			
	Pengawasan bidang LHK			
Terlaksananya Penegakan Hukum Pidana Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Kasus Pidana LHK yang diselesaikan sampai dengan P21	9 Kasus	8 Kasus	70
	Peningkatan Kapasitas Penegakan Hukum Pidana LHK	4 Orang	4 Orang	100

Tabel 11. Capaian Kinerja Utama Tahun 2021

c. Capaian Kinerja Utama Tahun 2022 sebagai berikut :

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian (%)
Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Ditjen PHLHK	Layanan Dukungan Manajemen Eselon I	1 Layanan	1 Layanan	100
Terlaksananya Operasi Pengamanan Hutan dan Peredaran Hasil Hutan	Jumlah Operasi Pengamanan Kawasan Hutan	6 Operasi	8 Operasi	120
	Jumlah operasi Peredaran Hasil Hutan Illegal			
	Penguatan Fungsi Pencegahan dan Pengamanan Hutan	40 Orang	40 Orang	100
Terawasinya Usaha dan/ atau kegiatan terhadap ketaatan izin lingkungan dan Peraturan Perundang-undangan terkait Bidang LHK	Penanganan Perusahaan Non Perusahaan	33 Perusahaan	32 Perusahaan	90
	Penanganan Pengaduan Non Perusahaan			
	Pengawasan bidang lingkungan hidup dan kehutanan			
Terlaksananya Penegakan Hukum Pidana Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Kasus tindak pidana LHK yang diselesaikan sampai dengan P21	7 Kasus	10 Kasus	120
	Peningkatan Kapasitas Penegakan Hukum Pidana LHK	4 Orang	4 Orang	100

Tabel 12. Capaian Kinerja Utama Tahun 2022

d. Capaian Kinerja Utama Tahun 2023 sebagai berikut :

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian (%)
Meningkatnya kondisi birokrasi dan layanan publik yang agile, efektif, dan efisien lingkup Ditjen PHLHK	Jumlah Layanan Perkantoran	1 Layanan	1 Layanan	100
	Jumlah Layanan Umum	1 Layanan	1 Layanan	100
	Jumlah Layanan Sarana Internal	1 Unit	1 Unit	100
Meningkatnya operasi pengamanan hutan, perusakan lingkungan hidup dan peredaran hasil hutan	Jumlah operasi pengamanan hutan dan penindakan perusakan lingkungan hidup	2 Operasi	2 Operasi	100
	Jumlah operasi pembalakan liar, tumbuhan dan satwa liar	2 Operasi	4 Operasi	120
	Jumlah Polhut yang ditingkatkan kapasitasnya	15 Orang	15 Orang	100
Meningkatnya pelaku usaha/ kegiatan yang diawasi terhadap perizinan dan peraturan perundang-undangan Bidang LHK	Jumlah Usaha dan/atau kegiatan yang diawasi ketaatannya terhadap Peraturan Perundang-undangan Bidang LHK	32 Badan Usaha	32 Badan Usaha	100
	Jumlah PPLH yang ditingkatkan kapasitasnya	10 Orang	10 Orang	100
Meningkatnya kasus tindak pidana lingkungan hidup dan kehutanan yang diselesaikan sampai dengan P21	Jumlah kasus pidana lingkungan hidup dan kehutanan yang diselesaikan sampai dengan P-21	13 Perkara	7 Perkara	53,85
	Jumlah PPNS LHK yang ditingkatkan kapasitasnya	5 Orang	5 Orang	100
Meningkatnya perkara Sengketa Lingkungan Hidup yang diselesaikan melalui pengadilan dan di luar pengadilan	Jumlah perkara Sengketa Lingkungan Hidup yang diselesaikan melalui pengadilan dan di luar pengadilan	1 Perkara	0 Perkara	0

Tabel 13. Capaian Kinerja Utama Tahun 2023

e. Prognosis Capaian Kinerja Utama Tahun 2024 sebagai berikut :

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian (%)
Meningkatnya kondisi birokrasi dan layanan publik yang agile, efektif, dan efisien lingkup Ditjen PHLHK	Nilai Kinerja Anggaran (NKA)	93,65 Poin	93,65 Poin	100
Meningkatnya operasi pengamanan hutan, perusakan lingkungan hidup dan peredaran hasil hutan	Jumlah operasi pengamanan hutan dan penindakan perusakan lingkungan hidup	10 Operasi	10 Operasi	100
	Jumlah operasi pembalakan liar, tumbuhan dan satwa liar	8 Operasi	8 Operasi	100
	Jumlah Polhut yang ditingkatkan kapasitasnya	15 Orang	15 Orang	100
Meningkatnya pelaku usaha/ kegiatan yang diawasi terhadap perizinan dan peraturan perundang-undangan Bidang LHK	Jumlah Usaha dan/atau kegiatan yang diawasi ketaatannya terhadap Peraturan Perundang-undangan Bidang LHK	26 Badan Usaha	26 Badan Usaha	100
Meningkatnya kasus tindak pidana lingkungan hidup dan kehutanan yang diselesaikan sampai dengan P21	Jumlah kasus pidana lingkungan hidup dan kehutanan yang diselesaikan sampai dengan P-21	13 Perkara	13 Perkara	100
Meningkatnya perkara Sengketa Lingkungan Hidup yang diselesaikan melalui pengadilan dan di luar pengadilan	Jumlah perkara Sengketa Lingkungan Hidup yang diselesaikan melalui pengadilan dan di luar pengadilan	1 Perkara	1 Perkara	100

Tabel 14. Prognosis Capaian Kinerja Utama Tahun 2024

f. Kerja Balai Gakkum LHK Mapua 2020-2024 (Prognosis)

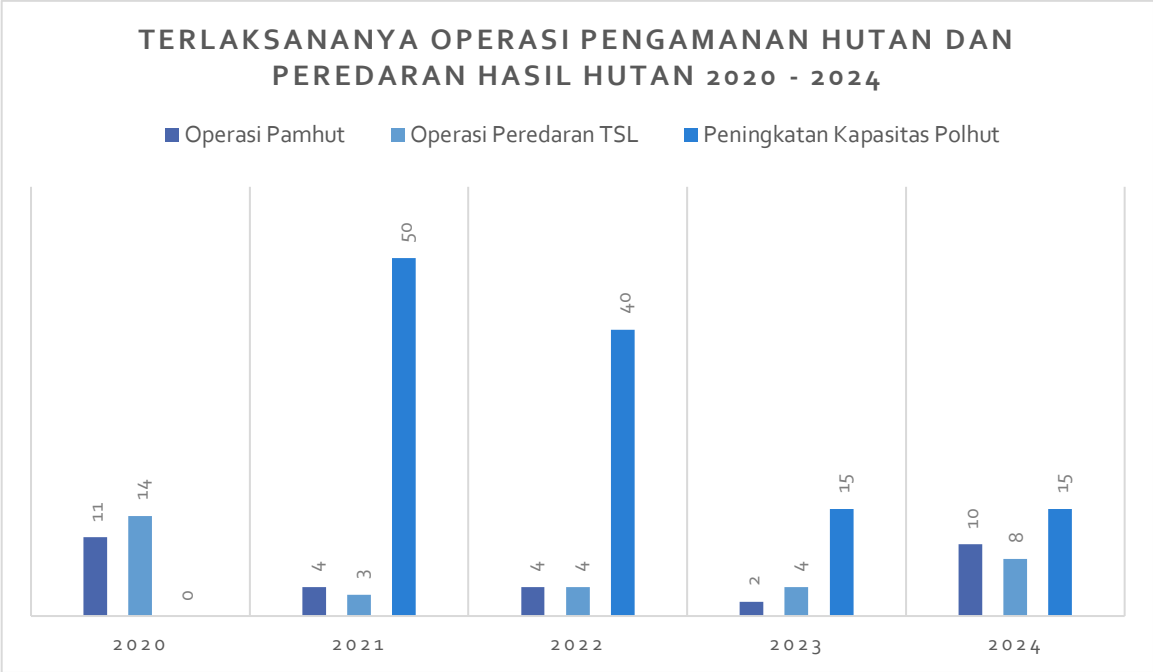

Gambar 5 : Operasi Pengamanan Hutan dan Peredaran Hasil Hutan Tahun serta Polhut yang ditingkatkan kapasitasnya Tahun 2020-2024

Operasi Pengamanan Hutan dan Peredaran Hasil Hutan : 46 Operasi
Peningkatan Kapasitas Polisi Kehutanan : 105 Orang

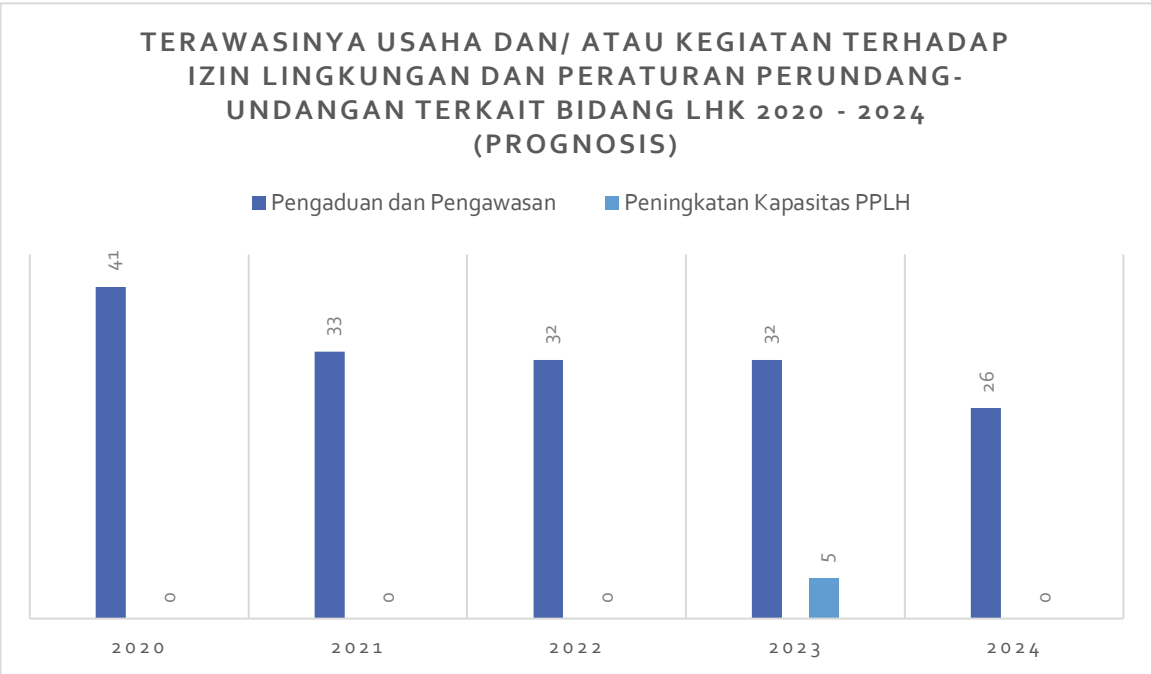

Gambar 6 : Jumlah Usaha dan/atau kegiatan yang diawasi ketaatannya terhadap Peraturan Perundang-undangan Bidang LHK Tahun 2020-2024

Penanganan Pengaduan dan Pengawasan LHK : 138 Pengaduan/ Badan Usaha
Peningkatan Kapasitas PPLH : 26 Orang

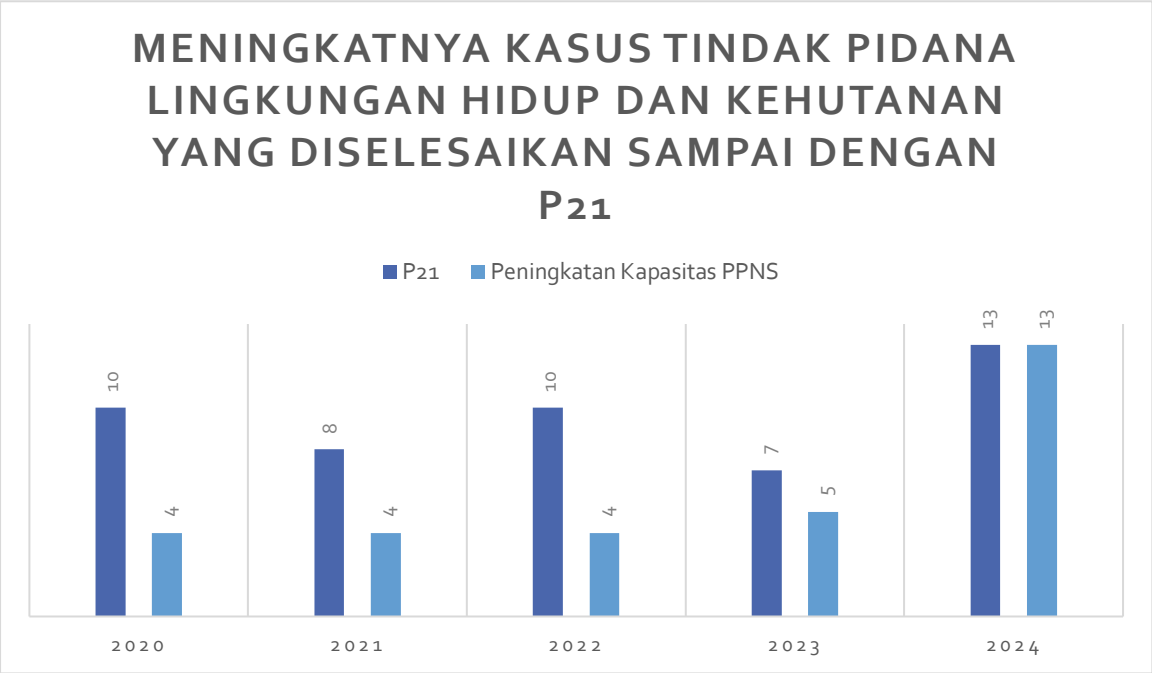

Gambar 7 : Jumlah kasus pidana LHK yang diselesaikan sampai dengan P21 Tahun 2020-2024

Penyelesaian Kasus P.21 : 35 Kasus
Peningkatan Kapasitas PPLH : 13 Orang

B. Capaian Serapan Anggaran Tahun 2020-2023 dan Prognosis Tahun 2024

Berikut Merupakan Pagu sesuai dengan Renstra dan Pagu Real tahun 2020-2024

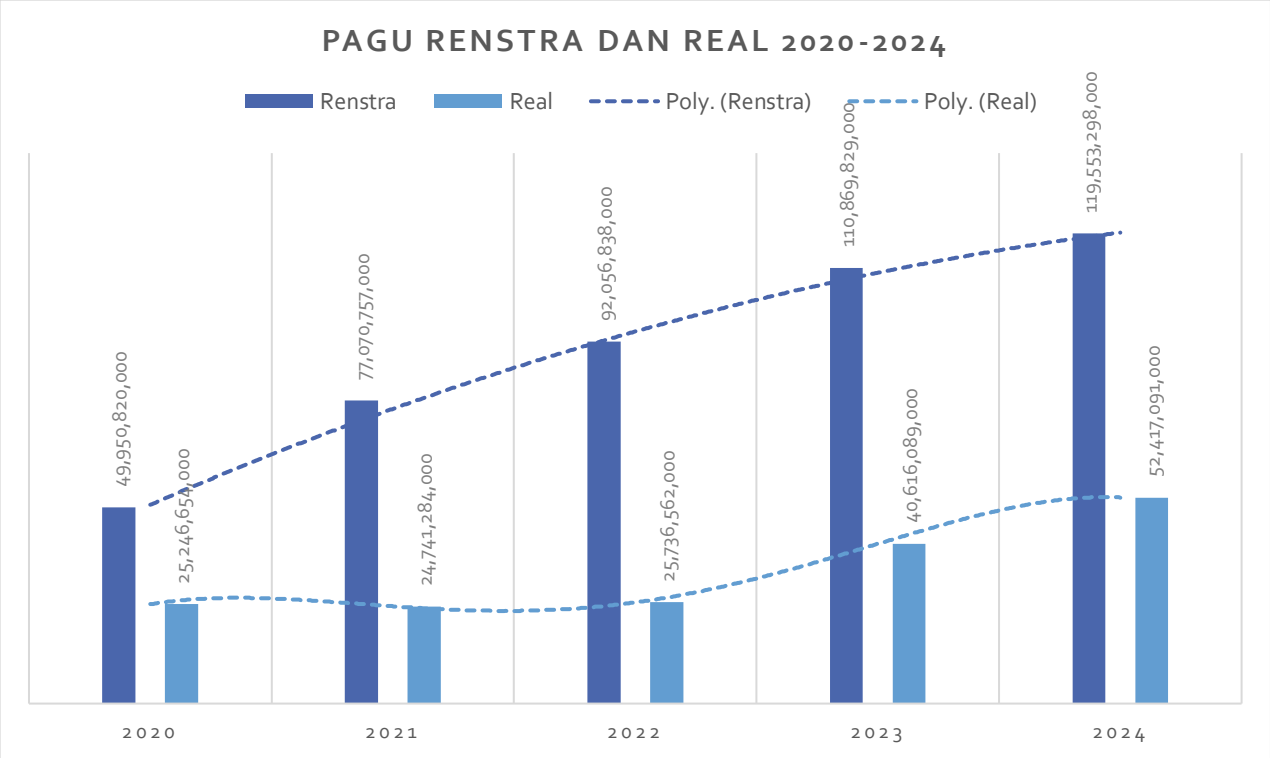

Gambar 8 : Grafik Pagu Renstra dan Real Tahun 2020-2024

Berikut merupakan nilai pagu dan realisasi Balai Pengamanan dan Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutan Wilayah Maluku dan Papua :

Tahun	51	52	53	Total
2020	12.150.728.000	12.574.426.000	521.500.000	**25.246.654.000**
2021	13.110.728.000	11.493.556.000	137.000.000	**24.741.284.000**
2022	14.818.200.000	10.918.362.000	-	**25.736.562.000**
2023	15.625.000.000	21.894.463.000	3.096.626.000	**40.616.089.000**
2024	17.772.344.000	19.644.747.000	15.000.000.000	**52.417.091.000**
Total	73.477.000.000	76.525.554.000	18.755.126.000	**168.757.680.000**

Tabel 15. Pagu Tahun 2020-2024

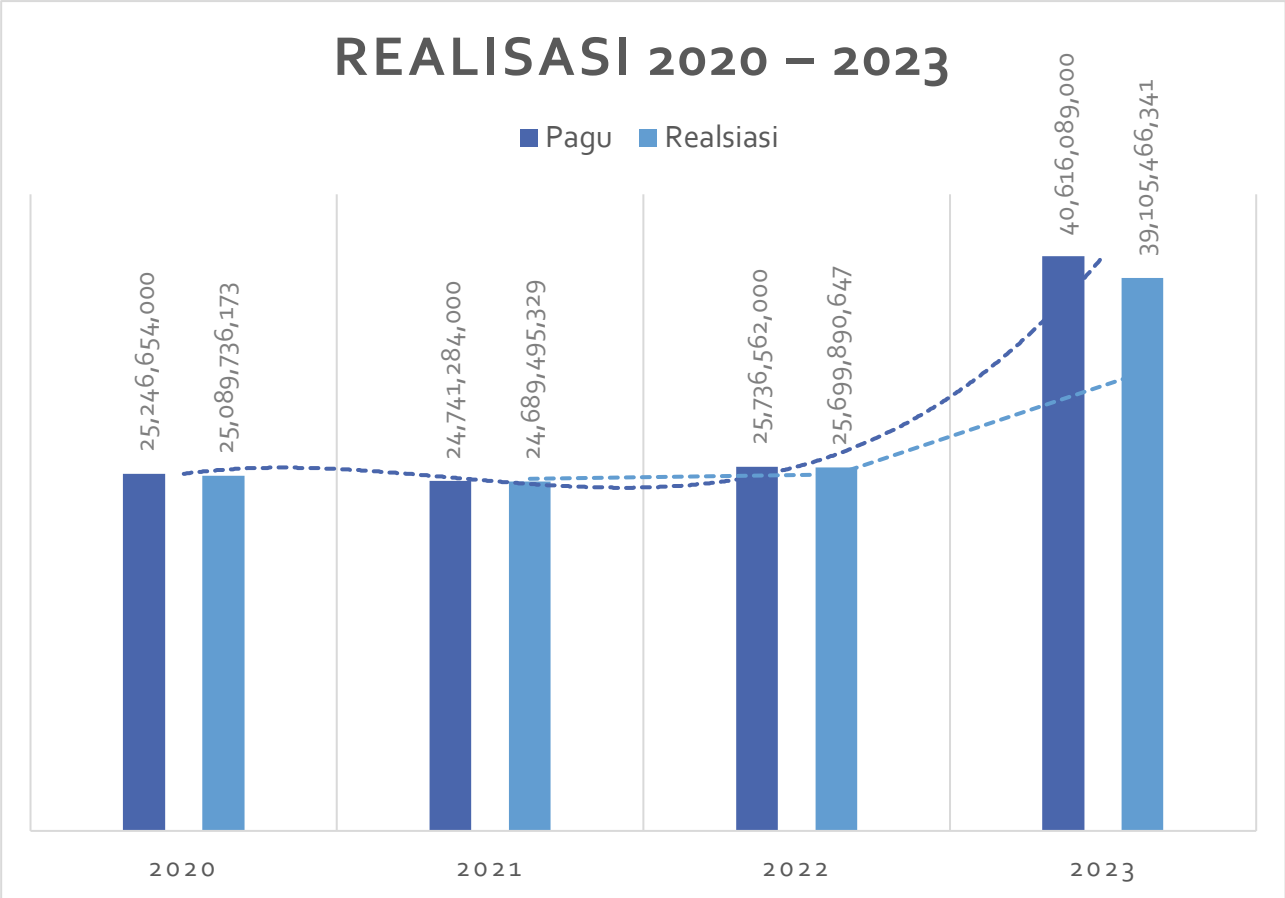

Gambar 9 : Grafik Realisasi Anggaran Tahun 2020-2023

Tahun	Pagu	Realsiasi	%
2020	25.246.654.000	25.089.736.173	99,37
2021	24.741.284.000	24.689.495.329	99,79
2022	25.736.562.000	25.699.890.647	99,85
2023	40.616.089.000	39.105.466.341	96,30
Total	**116.340.589.000**	**114.584.588.490**	**98.83**

Tabel 16. Data Pagu dan Realisasi Anggaran Tahun 2020-2023

III. RENCANA KERJA TAHUN 2024

A. Strategi dalam mendukung Prioritas Nasional

Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2024 (RKP 2024) Sesuai Peraturan Presiden Nomor 52 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah tahun 2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 211) disusun sebagai dasar kementerian/ Lembaga dalam pemuktahiran rancangan rencana kerja kementerian/ lembaga menjadi rencana kerja kementerian/ lembaga.

Bagi Pemerintah Pusat, RKP 2024 digunakan sebagai pedoman bagi K/L Menyusun rencana kerja dan anggaran kementerian Lembaga yang selanjutnya menjad acuan dalam penyusunan Rancangan Undang-undang Anggaran Pendapatan dan belanja Negara Tahun 2024.

Dokumen RKP 2024 menjabarkan rencana pembangunan secara lebih rinci ke dalam PN, PP, KP, dan MP dengan menjaga kesinambungan hirarki sasaran dan ketepatan indikator sasaran di setiap tingkatan kinerja untuk memastikan tercapainya sasaran dan target pembangunan serta terlaksananya evaluasi dan pengendalian pencapaian sasaran PN secara efektif

Arah Kebijakan Strategi Nasional

Misi Presiden

1. Penguatan Kualitas Manusia Indonesia;
2. Struktur Ekonomi yang Produktif dan Berdaua Saing;
3. Pembangunan yang Merata dan Berkeadilan;
4. Mencapai Lingkungan Hidup dan Berkelanjutan;
5. Kemajuan Budaya yang Mencerminkan Kepribadian Bangsa;
6. Penegakan Sistem Hukum yang Bebas Korupsi, bermartabat dan Terpercaya;
7. Perlindungan Bagi Segenap Bangsa dan Memberikan Rasa Aman pada Seluruh Warga;
8. Pengelolaan Pemerintahan yangBersih, Efektif dan Terpercaya;
9. Sinergi Pemerintah Daerah dalam Kerangka Negara Kesatuan.

Arahan Presiden

1. Pembangunan SDM;
2. Pembangunan Infrastruktur;
3. Penyederhanaan Regulasi;
4. Penyederhanaan Birokrasi;
5. Transformasi ekonomi.

Agenda Presiden

1. Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan berkeadilan;
2. Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan;
3. Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing;
4. Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan;
5. Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pemngembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar;
6. Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim;
7. Memperkuat Stabilitas Polhukam dan Transformasi Pelayanan Publik.

Tema Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2024 : **"Mempercepat Transformasi Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan"**

Arah Kebijakan dan Strategi Pembangunan

1. Pengurangan Kemiskinan dan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem
    - Memanfaatkan dan memutakhirkan data Registrasi Sosial ekonomi (Resosek untuk Peningkatan Akurasi Program Perlindungan Sosial;
    - Konvergensi pelaksanaan Program-Program perlindungan social;
    - Intervensi kolaboratif untuk penanggulangan kemiskinan;
    - Peningkatan Kesejahteraan petani dan nelayan;
    - Peningkatan kualitas konsumsi pangan.

2. Pembangunan Rendah Karbon dan Transisi Energi
    - Melaksanakan Pembangunan rendah karbon di lima sektor prioritas (energi berkelanjutan, pengelolaan lahan berkelanjutan, industry hijau, pengelolaan lahan berkelanjutan, industry hijau, pengelolaan limbah dan ekonomi sirkular, serta karbon biru dan pesisir);
    - Konservasi lahan produktif;
    - Menguatkan transisi energi melalui pemerataan akses energi berkeadilan;
    - Meningkatkan layanan tenaga listrik yang merata, berkualitas, berkelanjutan dan berkeadilan, serta perluasan pemanfaatan.
    -

3. Peningkatan Kualitas Pelayanan Pendidikan dan Kesehatan
    - Memperkuat penyelenggaraan tata Kelola kependudukan;
    - Reformasi system perlindungan sosial;
    - Meningkatkan pelayanan Kesehatan menuju cakupan Kesehatan semesta;
    - Meningkatkan pemerataan layanan Pendidikan berkualitas;
    - Meningkatkan kualitas anak, Perempuan dan pemuda;
    - Meningkatkan produktivitas dan daya saing.

4. Percepatan Pembangunan Insfrastruktur Dasar dan Konektivitas
    - Meningkatkan akses rumah tangga terhadap perumahan dan permukiman layak huni dan aman, dalam konteks pencegahan maupun pengentasan permukiman kumuh;
    - Meningkatkan ketahanan air ditingkat wilayan Sungai melalui penerapan pendekatan Simpan Air, Jaga Air dan Hemat Air;
    - Meningkatkan sinergi dan kolaborasi pengelolaan sumber daya air dengan berbagai agenda Pembangunan ekonomi dan meningkatkan ketahanan kebencanaan disetiap wilayah;
    - Meningkatkan SDM, sarana dan prasarana layanan keselamatan dan keamanan transportasi;
    - Meningkatkan konektivitas untuk mendukung kegiatan ekonomi dan aksesibilitas menuju pusat pelayanan dasar dan daerah tertinggal, terluar, terdepan dan perbatasan (3TP).

5. Revitalisasi Industri dan Penguatan Riset Terapan
    - Meningkatkan daya saing dan kompleksitas industry yang didukung percepatan hilirisasi dan penguatan rantai pasok;
    - Menyediakan iklim yang kondusif dalam penyusunan riset nasional.

6. Percepatan Pembangunan Ibu Kota Nusantara
    - Membangun Gedung pemerintahan dan hunian;
    - Membangun infrastruktur utama.

7. Penguatan Daya Saing Usaha
    - Meningkatkan kualitas teknologi informasi;
    - Meningkatkan nilai tambah dan daya saing ekonomi;
    - Mewujudkan investasi yang ramah dan kondusif;
    - Meningkatkan daya saing UMKM dan koperasi;
    - Meningkatkan modernisasi dan penerapan korporasi untuk daya saing pertanian dan kelautan perikanan.

8. Pelaksanaan Pemilihan Umum Tahun 2024
    - Mendorong terwujudnya tahapan Pemilu/Pemilihan sesuai jadwal
    - Meningkatkan kualitas penyelenggaraan kepemiluan;
    - Mengamankan penyelenggaraan Pemilu tahun 2024
    - Mendukung penyelenggaraan Pemilu di Luar Negeri.

Prioritas Nasional Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2024

Arah kebijakan dan strategi pembangunan nasional tahun 2024 selanjutnya dituangkan ke dalam Prioritas Nasional RKP Tahun 2024. Tujuh Prioritas Nasional merupakan Agenda Pembangunan yang termuat dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 dan tetap dipertahankan pada RKP Tahun 2024. Hal ini bertujuan untuk menjaga kesinambungan pembangunan serta mengoptimalkan efektivitas pengendalian pencapaian sasaran pembangunan jangka menengah. Ketujuh Prioritas Nasional RKP Tahun 2024 disampaikan sebagai berikut :

PN. 1 : Memperkuat Ketahanan Ekonomi Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan

PN. 2 : Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan

PN. 3 : Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing

PN. 4 : Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan

PN. 5 : Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar

PN. 6 : Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana dan Perubahan Iklim

PN. 7 : Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik

Tema Pembangunan Lingkungan Hidup dan Kehutanan

"Geliat Pengelolaan Hutan dan Lingkungan Hidup di Seluruh Provinsi Seiring Pertumbuhan Ekonomi yang Semakin Merata"

Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2024 bertema **" Mempercepat Transformasi Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan "** dijabarkan dalam 7 Prioritas Nasional (PN) , dimana Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Kementerian LHK) mendukung pada 4 (empat) PN yaitu :

(PN-1) Memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan berkualitas dan berkeadilan;

(PN-2) Mengembangkan wilayah untuk mengurangi kesenjangan dan menjamin pemerataan;

(PN-3) Meningkatkan sumberdaya manusia berkualitas dan berdaya saing; dan

(PN-6) Membangun lingkungan hidup, meningkatkan ketahanan bencana dan perubahan iklim.

Selanjutnya, 4 (empat) PN tersebut diinternalisasi ke dalam pembangunan LHK sebagai berikut.:

1. Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan
    - Meningkatkan ketahanan air untuk mendukung factor pertumbuhan ekonomi
    - Meningkatkan nilai tambah dan daya saing industry pengolahan dan destinasi wisata
2. Mengembangkan wilayah untuk mengurangi kesenjangan dan menjamin pemerataan
    - Membantu Menyiapkan Ibu Kota Nusantara
3. Meningkatkan sumberdaya manusia berkualitas dan berdaya saing
    - Membantu mengentaskan kemiskinan melalui perluasan tanah obyek reforma agrarian, perhutanan social, peningkatan kapasitas Masyarakat dan Pendidikan vokasi
4. Membangun lingkungan hidup, meningkatkan ketahanan bencana dan perubahan iklim
    - Meningkatkan kualitas lingkungan hidup

- Meningkatkan ketahanan bencana dan iklim

Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2024 bertema "Mempercepat Transformasi Ekonomi Yang Inklusif Dan Berkelanjutan", pada Prioritas Nasional 6 (PN-6) **Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim,** diinternalisasi ke dalam kebijakan Ditjen Gakkum KLHK sebagai berikut :

Rencana Strategi KLHK 2020 – 2024

Isu Lingkungan Hidup dan Kehutanan

a. Pengelolaan Sampah Limbah dan B3
b. AMDAL – UKL – UPL dan Izin Lingkungan
c. Pengendalian dan Kerusakan Lingkungan
d. Penataan Kawasan Usaha Kehutanan
e. Perbenihan Tanaman Hutan dan Pemulihan Pohon

Identifikasi dan Pertautan Isu

a. Penegakan Hukum
b. Pengelolaan DAS
c. Pengendalian Kebakaran Hutan
d. Pemberdayaan Masyarakat
e. Konservasi Biodiversitas
f. Ekonomi Lingkungan

Hints Program

a. Lokasi Sumber Daya Hutan untuk Pemerataan Ekonomi
b. Pengendalian Deforestrasi dan Degradasi hutan/ Lahan
c. Konservasi dan Pemeliharaan Biodiversity dan Biosfer
d. Peningkatan Produksi dan Produktifitas Hutan dan Jasa Lingkungan
e. Pengendalian Kejahatan Lingkungan
f. Kemitraan dan Keterlibatan Stakeholders dalam Rantau Usaha dan Sampah

Arah Kebijakan Direktorat Jenderal Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2024

PN. 6 : Membangun Lingkungan Hidup, meningkatkan Ketahanan Bencana dan Perubahan Iklim

Sasaran Prioritas Nasional 6 :

- Meningkatnya Indeks Kualitas Lingkungan Hidup dengan Perbaikan pada Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)
- Berkurangnya Kerugian Akibat Dampak Bencana dan Bahaya Iklim dengan perbaikan pada penurunan potensi kehilangan PDB akibat dampak bencana dan iklik terhadap PDB.
- Meningkatnya capaian penurunan emisi dan intensitas Emisi Gas Rumah Kaca (GRK) terhadap baseline dengan perbaikan pada (a) Persentase penurunan Emisi GRK-Kumulatif, (b) Persentase penurunan GRK-Tahunan, dan (c) Persentase Penurunan Intensitas Emisi GRK

Peningkatan Kualitas SDM : Kesehatan dan Pendidikan

→ Peningkatan Kapasitas Aparat Penega Hukum LHK

Penanggulangan Pengangguran disertai dengan Peningkatan Decent Job

→ Pelaksanaan Penegakan Hukum LHK untuk memastikan masyarakat sekitar hutan tidak kehitangan haknya

Mondorong Pemulihan Dunia Usaha

→ Prinsip Resorative Justice dengan Penerapan Sanksi Admnistrasi pada perushaan sebagai pelaksanaan mandate UUCK

Pembangunan Rencah Karbon dan Transisi Energi (Respon terhadap Perubahan Iklim)

→ Penegakan Hukum LH Sebagai kontribusi pada Folu Netsink 2030

Pengembangan Ibu Kota Nusantara

→ Penguatan Penegakan Hukum LHK di sekitar Kawasan IKN dengan pelaksanaan operasi pengawsan dan penindakan.

Prioritas Nasional 6 (enam) :

Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana dan Perubahan Iklim

- Program Prioritas 1 : Peningkatan Kualitas Lingkungan hidup

  Kegatan Prioritas 1 : Pencegahan Pencemaran dan Kerusakan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup
- Program Prioritas 2 : Peningkatan Ketahanan Bencana dan Iklim

  Kegiatan Prioritas : Penanggulangan Pencemaran dan Kerusakan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup

Prioritas

Dukungan Ditjen PHLHK dalam Hal Ini Balai Pengamanan dan Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan Wilayah Maluku dan Papua Tahun Anggaran 2024 sebesar : Rp. 52.417.091.000

Indikator Kinerja Kegiatan

Kegiatan	Sasaran kegiatan	Indikator	Klasifikasi Rincian Output	Rincian Output	Komponen
5430 - Penanganan Pengaduan Pengawasan dan Sanksi Administrasi	Meningkatnya pelaku usaha/ kegiatan yang diawasi terhadap perizinan dan peraturan perundang-undangan bidang LHK	Jumlah Usaha dan/ atau kegiatan yang diawasi ketaatannya terhadap peraturan perundang-undangan LHK	QIH - Pengawasan dan Pengendalian Badan Usaha	001 - Badan Usaha yang diawasi ketaatannya terhadap Peraturan Perundang-undangan Bidang LHK	051 – Penanganan Pengaduan Perusahaan
					052 – Penanganan Pengaduan Non Perusahaan
					053 – Pengawasan Bidang LHK

Nilai Pagu dan Target Output

Rincian Output	Target	Komponen	Pagu
001 - Badan Usaha yang diawasi ketaatannya terhadap Peraturan Perundang-undangan Bidang LHK	26 Badan Usaha	051 – Penanganan Pengaduan Perusahaan	254.000.000
		052 – Penanganan Pengaduan Non Perusahaan	230.400.000
		053 – Pengawasan Bidang LHK	877.760.000
Total			1.362.160.000

Kegiatan	Sasaran kegiatan	Indikator	Klasifikasi Rincian Output	Rincian Output	Komponen
5431 - Penegakan Hukum Pidana Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Meningkatnya kasus tindak pidana lingkungan hidup dan kehutanan yang	Jumlah Kasus Pidana LHK yang diselesaikan sampai dengan P21/ berkas	QCE – Penanganan Perkara	001 – Kasus Tindak Pidana LHK P21	051 - Pengumpulan Bahan dan Keterangan atas Dugaan Tindak Pidana LHK

	diselesaiakn sampai dengan P21	perkara dinyatakan lengkap			052 - Penyidik Kasus Tindak Pidana LHK
					053 – Pra Peradilan Kasus Tindak Pidana LHK
					054 – Fasilitas Penanganan Kasus Tindak Pidana Lingkungan Hidup dan Kehutanan
					055 – Dukungan Teknis Penegakan Hukum Pidana LHK

Nilai Pagu dan Target Output

Rincian Output	Target	Komponen	Pagu
001 – Kasus Tindak Pidana LHK P21	13 Perkara	051 - Pengumpulan Bahan dan Keterangan atas Dugaan Tindak Pidana LHK	2.026.530.000
		052 - Penyidik Kasus Tindak Pidana LHK	2.253.680.000
		053 – Pra Peradilan Kasus Tindak Pidana LHK	301.550.000
		054 – Fasilitas Penanganan Kasus Tindak Pidana Lingkungan Hidup dan Kehutanan	400.000.000
		055 – Dukungan Teknis Penegakan Hukum Pidana LHK	100.000.000
Total			5.081.760.000

Kegiatan	Sasaran kegiatan	Indikator	Klasifikasi Rincian Output	Rincian Output	Komponen
5429 – Penyelesaian Sengketa	Meningkatnya Perkara Sengketa	Jumlah Sengketa Lingkungan	QCE – Penanganan Perkara	001 – Sengketa Lingkungan	051 - Verifikasi dan Klarifikasi

Lingkungan Hidup	Lingkungan Hidup yang diselesaikan melalui Pengadilan dan diluar Pengadilan	Hidup yang diselesaikan melalui pengadilan dan diluar engadilan		Hidup yang ditangani Verifikasi dan Klarifikasi Perkara Sengketa LH	Perkara Sengketa LH
					052 - Penghitungan Kerugian LH/ Masyarakat
					053 – Negosiasi dan Fasilitasi Kesepakatan

Nilai Pagu dan Target Output

Rincian Output	Target	Komponen	Pagu
001 – Sengketa Lingkungan Hidup yang ditangani Verifikasi dan Klarifikasi Perkara Sengketa LH	1 Perkara	051 - Verifikasi dan Klarifikasi Perkara Sengketa LH	120.000.000
		052 - Penghitungan Kerugian LH/ Masyarakat	50.000.000
		053 – Negosiasi dan Fasilitasi Kesepakatan	150.000.000
Total			320.000.000

Kegiatan	Sasaran kegiatan	Indikator	Klasifikasi Rincian Output	Rincian Output	Komponen
Pencegahan dan Pengamanan Hutan	Meningkatnya Operasi Pengamanan Hutan, perusakan lingkungan hidup dan peredaran hasil hutan	Jumlah Operasi Pengamanan hutan dan Penindakan Lerusakan LH, Jumlah Operasi Pembalakan Liar, tumbuhan dan Satwa Liar, Jumlah Polhut yang ditingkatkan kapasitasnya	DCE – Pelatihan Bidang Kehutanan dan Lingkungan Hidup	001 – Polisi Kehutanan yang ditingkatkan Kapasitasnya	Peningkatan Polisi Kehutanan
			QHD – Operasi Pengawasan Sumber Daya Alam	001 – Operasi Pengamanan Kawasan Hutan	051 – Pengumpulan Data dan Informasi Ancaman dan Gangguan Kawasan

					Hutan
					052 – Operasi Pemulihan Keamanan Kawasan Hutan
				002 – Operasi Peredaran Hasil Hutan Illegal	051 – Pengumpulan Data dan Informasi Peredaran Hasil Hutan Illegal
					052 – Sosialisasi dan Kerjasama Pencegahan dan Pengamanan Hutan
					054 – Operasi Pembalakan Liar
					055 – Operasi Tumbuhan dan Satwa Liar
					057 – Dukungan Teknis Pencegahan dan Pengamanan Hutan

Nilai Pagu dan Target Output

Rincian Output	Target	Komponen	Pagu
001 – Polisi Kehutanan yang ditingkatkan Kapasitasnya	15 Orang	051 – Peningkatan Kapasitas Polisi Kehutanan	200.000.000
001 – Operasi Pengamanan Kawasan Hutan	10 Operasi	051 – Pengumpulan Data dan Informasi Ancaman dan Gangguan Kawasan Hutan	1.535.288.000
		052 – Operasi	2.519.000.000

		Pemulihan Keamanan Kawasan Hutan	
002 – Operasi Peredaran Hasil Hutan Illegal	8 Operasi	051 – Pengumpulan Data dan Informasi Peredaran Hasil Hutan Illegal	1.155.792.000
		053 – Sosialisasi dan Kerjasama Pencegahan dan Pengamanan Hutan	100.000.000
		054 – Operasi Pembalakan Liar	1.018.128.000
		055 – Operasi Tumbuhan dan Satwa Liar	806.440.000
		057 – Dukungan Teknis Pencegahan dan Pengamanan Hutan	600.000.000
Total			7.934.648.000

Tabel 17. Nilai Pagu dan Target Output Tahun 2024

IV. PENUTUP

Kata Penutup

Rencana Kerja Balai Pengamanan dan Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan Wilayah Maluku dan Papua Tahun 2024 perlu dilaksanakan dan dikawal bersama seiring Percepatan Pemulihan Ekonomi dan Reformasi Sosial dengan memperhatikan protokol Kesehatan. Renja/RKT 2024 ini tak hanya berisi semangat untuk memperkuat apa yang telah dicapai di tahun 2023, namun demikian didalamnya memuat komitmen meletakkan landasan pencapaian pembangunan tahun 2024.

Renja ini memuat berbagai upaya dan keberhasilan Ditjen Gakkum LHK dan Balai Pengamanan dan Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan Wilayah Maluku dan Papua Tahun 2024 dalam melaksanakan berbagai tugas yang diembankan dalam mewujudkan pembangunan berkelanjutan berdasarkan Rencana Strategi LHK tahun 2020 s.d 2024, Rencana Strategi Ditjen Gakkum LHK tahun 2020 s.d 2024 serta Rencana Strategi Balai Pengamanan dan Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan Wilayah Maluku dan Papua Tahun 2020 s.d 2024 dengan hasil sesuai rencana yang diharapkan dan secara keseluruhan dapat mencapat target dan sasaran yang telah di tetapkan. Pemantauan dari upaya pencapaian kinerja ini akan dilaksanakan oleh Inspektorat Jenderal dalam bentuk Audit Kinerja, sedangkan Sekretariat Jenderal LHK diharapkan dapat mengkoordinasikan pemantauan kinerja yang akan dituangkan ke dalam Laporan Kinerja dan LAKIP KLHK di tahun 2024.

Lampiran 1 – Rencana Aksi BPPHLHK Wilayah Maluku dan Papua Tahun 2024

Sasaran Strategis		Indikator Kinerja		Kegiatan Pendukung	Anggaran/Pagu (Rp)	Satuan Output / Komponen	Target Output / Komponen	Target Per Triwulan			
								TW. I	TW. II	TW. III	TW. IV
1	Meningkatnya pelaku usaha/kegiatan yang diawasi terhadap perizinan dan peraturan perundang-undangan bidang LHK	1	Jumlah Usaha dan/atau kegiatan yang diawasi ketaatannya terhadap Peraturan Perundang-undangan Bidang LHK	− Penanganan Pengaduan Perusahaan − Penanganan Pengaduan Non Perusahaan − Pengawasan Bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan	1.362.160.000	Badan Usaha	26	4	12	22	26
2	Meningkatnya kasus tindak pidana lingkungan hidup dan kehutanan yang diselesaikan sampai dengan P21	1	Jumlah kasus pidana LHK yang diselesaikan sampai dengan P21/berkas perkara dinyatakan lengkap	− Pengumpulan Bahan dan Keterangan atas Dugaan Tindak Pidana LHK − Penyidikan Kasus Tindak Pidana LHK − Pra Peradilan Kasus Tindak Pidana LHK − Fasilitasi Penanganan Kasus Tindak Pidana LHK − Dukungan Teknis Penegakan Hukum Pidana LHK	5.081.760.000	Perkara	13	2	5	9	13
3	Meningkatnya operasi pengamanan hutan, perusakan lingkungan hidup	1	Jumlah operasi pengamanan hutan dan penindakan kerusakan lingkungan hidup	− Pengumpulan Data dan Informasi Ancaman dan Gangguan Kawasan Hutan − Operasi Pemulihan	4.054.288.000	Operasi	10	0	3	7	10

	dan peredaran hasil hutan			Keamanan Kawasan Hutan							
		2	Jumlah operasi pembalakan liar, tumbuhan dan satwa liar	− Pengumpulan Data dan Informasi Peredaran Hasill Hutan Illegal − Sosialisasi dan Kerjasama Pencegahan dan Pengamanan Hutan − Operasi Pembalakan Liar − Operasi Tumbuhan dan Satwa Liar	3.680.360.000	Operasi	8	0	3	6	8
		3	Jumlah Polhut yang ditingkatkan kapasitasnya	Peningkatan Kapasitas Polisi Kehutanan	200.000.000	Orang	15	0	5	12	15
4	Meningkatnya perkara sengketa lingkungan hidup yang diselesaikan melalui pengadilan dan di luar pengadilan	1	Jumlah Sengketa Lingkungan Hidup yang diselesaikan melalui pengadilan dan di luar pengadilan	− Verifikasi danKlarifikasi Perkara Sengketa LH − Penghitungan Kerugian LH/Masyarakat − Negosiasi dan Fasilitasi Kesepakatan	320.000.000	Perkara	1	0	0	0	1
5	Meningkatnya kondisi birokrasi dan layanan publik yang agile, efektif dan efisien Lingkup Ditjen PHLHK	1	Nilai Kinerja Anggaran (NKA)	− Layanan Umum − Layanan Perkantoran − Layanan Sarana dan Prasarana Internal	37.718.523.000	Point	93,65	14,10	28,20	60,92	93,65

Lampiran 2 – Rincian Ouput Per Program Tahun 2024

Program	Rincian Output	Target Renstra 2024	Anggaran Renstra 2024	Target Renja 2024	Anggaran Renja 2024
1 – Pengelolaan Hutan Berkelanjutan (029.FF)	1. Operasi Pengamanan Kawasan Hutan	30 Operasi	3.851.415.000	10 Operasi	4.054.288.000
	2. Operasi Peredaran Hasil Hutan Illegal	40 Operasi	3.697.358.000	8 Operasi	3.680.360.000
	3. Peningkatan Kapasitas Polisi Kehutanan	50 Orang	1.444.281.000	15 Orang	200.000.000
2 – Kualitas Lingkungan Hidup (029.FD)	1. Pengawasan Ketaatan LHK terhadap Badan usaha	26 Lembaga	1.619.188.083	26 Lembaga	1.362.160.000
	2. Peningkatan Kapasitas PPLH	n/a	n/a	n/a	n/a
	1. Kasus Tindak Pidana LHK P-21	25 Perkara	4.621.450.000	13 Perkara	5.081.760.000
	2. Peningkatan Kapasitas PPNS	n/a	n/a	n/a	n/a
3 – Dukungan Manajemen (029.WA)	1. Layanan Perkantoran Unit Pelaksana Teknis	1 Layanan	18.958.796.000	1 Layanan	20.718.523.000
	2. Layana Sarana Internal	1 Layanan	4.280.000.000	1 Layanan	15.000.000.000
	3. Layanan Umum	1 Layanan	1.300.000.000	1 Layanan	2.000.000.000
Pagu Anggaran Balai PPHLHK Wilayah Maluku dan Papua Tahun 2024			**39.772.488.000**		**38.943.292.000**

Lampiran 3 – Kegiatan Pencegahan dan Pengamanan Hutan

Sasaran Kegiatan	Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Rincian Output	Lokasi Kegiatan	Target 2024	Anggaran
Terlaksananya Operasi Pengamanan Hutan dan Peredaran Hasil Hutan Illegal	Pencegahan dan Pengamanan Hutan	Jumlah Operasi Pengamanan Kawasan Hutan	Operasi Pengamanan Kawasan Hutan	Maluku, Maluku Utara, Papua, Papua Barat, Papua Barat Daya, Papua Selatan, Papua Tengah, Papua Pegunungan, Papua Selatan	10 Operasi	4.054.288.000
		Jumlah Operasi Peredaran Hasil Hutan	Operasi Peredaran Hasil Hutan		8 Operasi	3.680.360.000
		Jumlah Polhut yang ditingkatkan kapasitasnya	Polhut yang ditingkatkan kapasitasnya	Manokwari,Sorong, Ambon, Ternate, Jayapura, Merauke	15 Orang	200.000.000
Total						7.934.648.000

Lampiran 4 – Kegiatan Pencegahan dan Pengamanan Hutan

Sasaran Kegiatan	Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Rincian Output	Lokasi Kegiatan	Target 2024	Anggaran
Meningkatnya Perkara Sengketa Lingkungan Hidup yang diselesaikan melalui Pengadilan dan diluar Pengadilan	Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup	Jumlah Sengketa Lingkungan Hidup yang diselesaikan melalui pengadilan dan diluar engadilan	Penanganan Perkara	Maluku, Maluku Utara, Papua, Papua Barat, Papua Barat Daya, Papua Selatan, Papua Tengah, Papua Pengunungan, Papua Selatan	1 Perkara	320.000.000
Total						320.000.000

Lampiran 5 – Kegiatan Pengaduan, Pengawasan dan Sanksi Administrasi

Sasaran Kegiatan	Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Rincian Output	Lokasi Kegiatan	Target 2024	Anggaran
Terawasinya Usaha dan /atau kegiatan terhadap izin lingkungan dan peraturan perundangan undangan terkait bidang LHK	Pengaduan, Pengawasan dan Sanksi Administrasi	Jumlah Usaha dan/ atau kegiatan yang diawasi ketaatannya terhadap Peraturan Bidang LHK	Pengawasan Ketaatan LHK terhadap Badan usaha	Maluku, Maluku Utara, Papua, Papua Barat, Papua Barat Daya, Papua Selatan, Papua Tengah, Papua Pengunungan, Papua Selatan	26 Lembaga	1.362.160.000
Total						1.362.160.000

Lampiran 6 – Kegiatan Penegakan Hukum Pidana dan LHK

Sasaran Kegiatan	Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Rincian Output	Lokasi Kegiatan	Target 2024	Anggaran
Terselesaikannya Kasus Pidana Lingkungan Hidup dan Kehutanan sampai dengan P-21	Penegakan Hukum Pidana Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Kasus Tindak Pidana LHK yang diselesaikan sampai dengan P.21	Kasus Tindak Pidana LHK P.21	Maluku, Maluku Utara, Papua, Papua Barat, Papua Barat Daya, Papua Selatan, Papua Tengah, Papua Pengunungan, Papua Selatan	13 Perkara	5.081.760.000
Total						5.081.760.000

Lampiran 7 – Dukungan Manajemen Teknis Ditjen Gakkum LHK

Sasaran Kegiatan	Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Rincian Output	Lokasi Kegiatan	Target 2024	Anggaran
Terwujudnya Reformasi Tata Kelola Kepemerintahan yang baik dilingkungan Ditjen Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya	Layanan Perkantoran Unit Pelaksana Teknis	Layanan Perkantoran Unit Pelaksana Teknis	Manokwari, Ambon, Jayapura	1 Layanan	23.468.292.000
		Layana Sarana Internal	Layana Sarana Internal	Manokwari, Ambon, Jayapura	1 Layanan	15.000.000.000
		Layanan Umum	Layanan Umum	Manokwari, Ambon, Jayapura	1 Layanan	2.000.000.000
Total						24.468.292.000